

KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP LEMBAGA-LEMBAGA PENEGAK HUKUM DAN AGENDA PEMBERANTASAN KORUPSI

Temuan Survei Nasional:
18 - 24 MEI 2022

The logo for INDIKATOR features the word "INDIKATOR" in a bold, black, sans-serif font. The letter "O" is stylized as a circle with a red and white arrow pointing upwards and to the right, and a teal circle in the center. A thick red horizontal bar is positioned above the text, and a red and white geometric shape is at the bottom of the page.

INDIKATOR

Jl. Cisadane No. 8, Menteng – Jakarta Pusat

Telp: (021) 31927996/98, Fax: (021) 3143867

Website: www.indikator.co.id

PENGANTAR

- Reformasi 1998 mengamanatkan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dari banyak agenda reformasi, penegakan hukum dan pemberantasan KKN hingga kini masih menyisakan pekerjaan rumah besar. Agenda ini juga mengalami pasang surut. Pengungkapan kasus-kasus besar seolah masih terkendala aneka kepentingan dan agenda lain yang menyebabkannya belum tuntas.
- Tak heran jika hingga kini, setelah lebih dari 20 tahun reformasi, Indonesia masih berada di bawah rata-rata global dalam skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Dalam rilis oleh Transparency International Indonesia (TII), IPK 2021 Indonesia sebesar 38 dengan ranking 96, di bawah rata-rata IPK global 43 dari 180 negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlu upaya lebih keras yang diiringi *political will* dari pemegang kekuasaan untuk menempatkan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi sebagai agenda prioritas.
- Saat ini, memang sejumlah kasus tampak masih dalam penanganan aparat penegak hukum dan mendapat perhatian publik. Di antaranya kasus korupsi minyak goreng, kasus Bank Century, dan kasus hukum Djoko Tjandra.

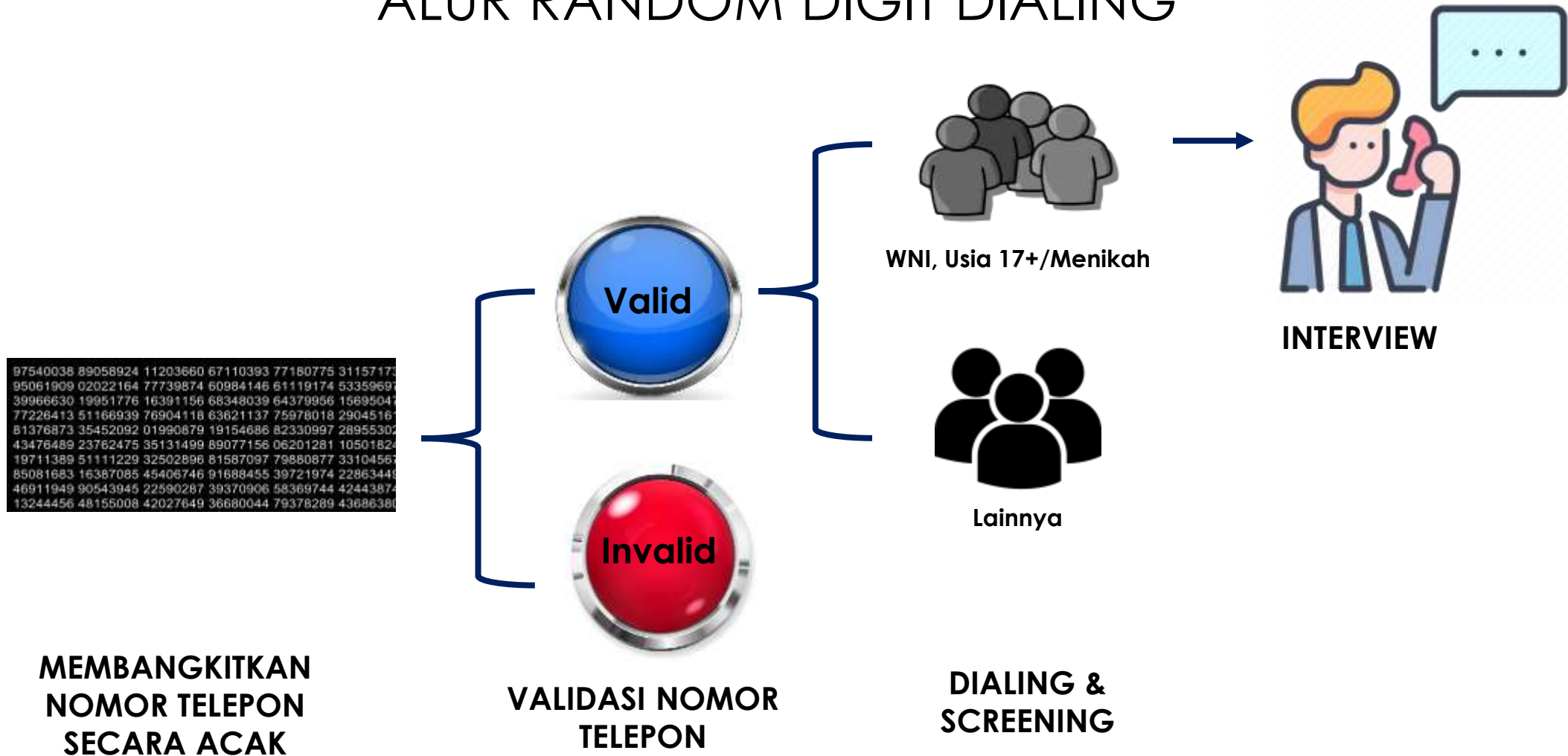
PENGANTAR

- Di luar kasus-kasus hukum tersebut, publik juga memperhatikan bagaimana kasus tersebut mempengaruhi kehidupan mereka, di samping isu-isu nasional lain yang juga penting. Di antaranya mengenai peran Indonesia dalam G20, sikap terhadap perang Rusia-Ukraina, dan wabah COVID-19.
- Pandangan dan sikap publik terhadap kasus hukum akan sangat berkaitan dengan kepercayaan mereka terhadap lembaga-lembaga penegak hukum, dan tentu saja terhadap pemerintahan Joko Widodo.
- Oleh karena itu, Indikator Politik Indonesia mengadakan survei opini publik secara nasional untuk mengetahui tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum, serta persepsi mereka atas kasus-kasus korupsi sebagai bagian dari evaluasi publik atas agenda pemberantasan korupsi sejauh ini. Survei juga menanyakan tentang isu-isu nasional yang penting, serta memetakan sejauh mana pengetahuan dan sikap publik dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi berhubungan dengan kepuasan pada Presiden.
- Hasil survei diharapkan dapat berkontribusi pada upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di tanah air, serta menjadi salah satu rujukan bagi pengambil kebijakan.

METODE

- Target populasi survei ini adalah warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon/cellphone, sekitar 83% dari total populasi nasional.
- Pemilihan sampel dilakukan melalui metode random digit dialing (RDD). RDD adalah teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak.
- Dengan teknik RDD sampel sebanyak 1213 responden dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi, dan screening. Margin of error survei diperkirakan $\pm 2.9\%$ pada tingkat kepercayaan 95%, asumsi simple random sampling.
- Wawancara dengan responden dilakukan lewat telepon oleh pewawancara yang sudah dilatih.

ALUR RANDOM DIGIT DIALING



KET: RDD difokuskan pada nomor HP (selular), bukan nomor telepon rumah (fixed line). Ini didasarkan atas temuan penelitian sebelumnya bahwa warga dewasa yang mempunyai telepon rumah secara nasional hanya sekitar 3.4%, dan hampir semua dari pemilik telepon rumah tersebut memiliki HP.

RESPONSE RATE

Total nomor telepon yang dikontak (dialed)	Total pemilik telepon yang mengaku WNI usia 17+/ menikah	Jumlah Responden yang berhasil diwawancarai
16644	2662	1213

TEMUAN: VALIDASI SAMPEL

PROFIL DEMOGRAFI: SAMPEL VS POPULASI

KATEGORI	SAMPEL	POPULASI
GENDER		
Laki-laki	50.1	50.0
Perempuan	49.9	50.0
DESA-KOTA		
Pedesaan	49.9	50.2
Perkotaan	50.1	49.8
USIA		
<= 20 tahun	10.3	10.3
21-25 tahun	12.6	12.5
26-30 tahun	13.5	13.5
31-35 tahun	12.1	12.0
36-40 tahun	11.7	11.6
41-45 tahun	9.9	9.8
46-50 tahun	8.6	8.6
51-55 tahun	6.6	6.6
56-60 tahun	5.0	5.1
> 60 tahun	9.6	10.1

KATEGORI	SAMPEL	POPULASI
AGAMA		
Islam	87.0	87.2
Protestan/Katolik	9.9	9.9
Lainnya	3.1	3.0
ETNIS		
Jawa	41.1	40.2
Sunda	15.6	15.5
Batak	3.6	3.6
Madura	3.2	3.0
Betawi	2.9	2.9
Minang	2.6	2.7
Bugis	2.6	2.7
Melayu	2.2	2.3
Lainnya	26.1	27.1
PENDIDIKAN		
<= SD	36.7	37.0
SLTP	18.6	18.0
SLTA	30.4	31.2
Kuliah	13.6	13.7
TT/TJ	0.7	

PROFIL DEMOGRAFI: SAMPEL VS POPULASI

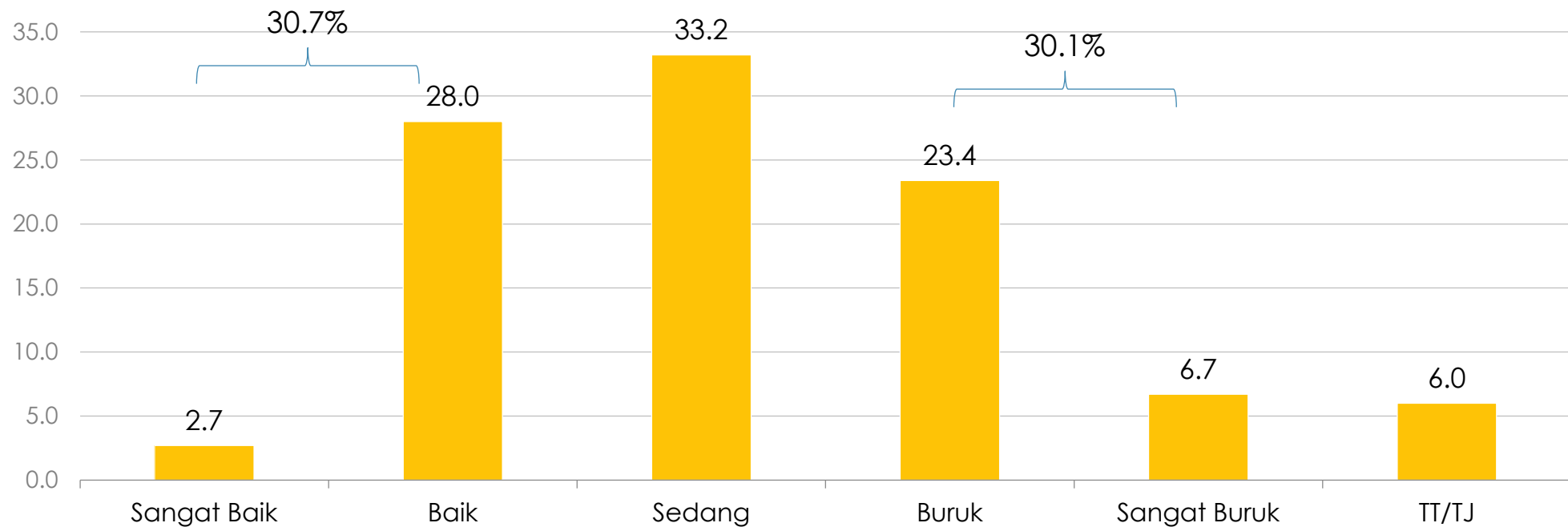
KATEGORI	SAMPEL	POPULASI
PROVINSI		
ACEH	1.8	1.8
SUMATERA UTARA	5.1	5.1
SUMATERA BARAT	1.9	1.9
RIAU	2.0	2.0
JAMBI	1.3	1.3
SUMATERA SELATAN	3.1	3.1
BENGKULU	0.7	0.7
LAMPUNG	3.2	3.2
KEPULAUAN BANGKA	0.5	0.5
KEPULAUAN RIAU	0.6	0.6
DKI JAKARTA	4.1	4.1
JAWA BARAT	17.4	17.4
JAWA TENGAH	14.6	14.6
D I YOGYAKARTA	1.4	1.4
JAWA TIMUR	16.2	16.2
BANTEN	4.3	4.3
BALI	1.6	1.6

KATEGORI	SAMPEL	POPULASI
PROVINSI		
NUSA TENGGARA BARAT	1.9	1.9
NUSA TENGGARA TIMUR	1.8	1.8
KALIMANTAN BARAT	1.9	1.9
KALIMANTAN TENGAH	0.9	0.9
KALIMANTAN SELATAN	1.5	1.5
KALIMANTAN TIMUR	1.3	1.3
KALIMANTAN UTARA	0.2	0.2
SULAWESI UTARA	1.0	1.0
SULAWESI TENGAH	1.0	1.0
SULAWESI SELATAN	3.2	3.2
SULAWESI TENGGARA	0.9	0.9
GORONTALO	0.4	0.4
SULAWESI BARAT	0.5	0.5
MALUKU	0.7	0.7
MALUKU UTARA	0.4	0.4
PAPUA BARAT	0.4	0.4
PAPUA	1.9	1.9

EVALUASI TERHADAP KONDISI UMUM

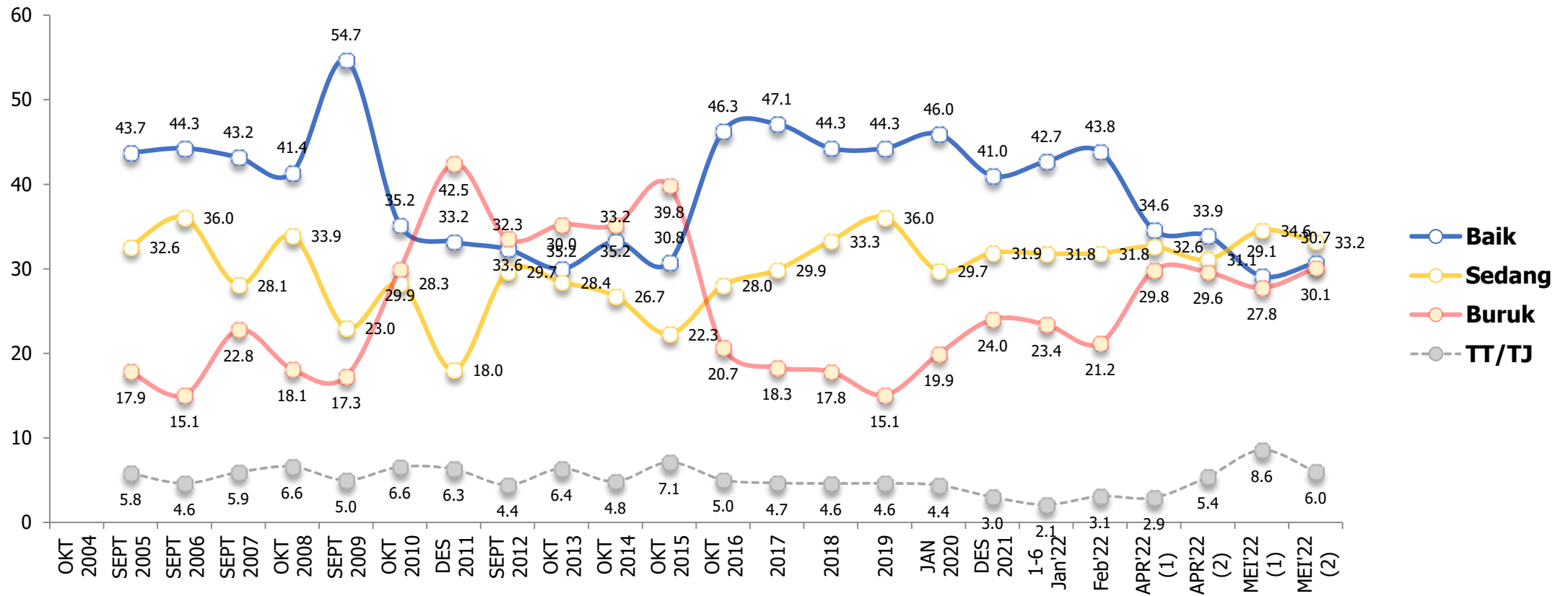
PENEGAKAN HUKUM NASIONAL

Bagaimana Ibu/Bapak melihat keadaan penegakan hukum di negara kita pada umumnya sekarang? sangat baik, baik, sedang, buruk, atau sangat buruk?... (%)



Kebanyakan keadaan penegakan hukum dinilai "sedang", yang menilai negative kurang lebih sama banyak dengan yang menilai positif.

TREN KONDISI PENEGAKAN HUKUM NASIONAL



Yang menilai baik kecenderungannya terus menurun di tahun 2022 ini.



PENEGAKAN HUKUM NASIONAL MENURUT DEMOGRAFI DAN BASIS PEMILU 2019

	Base	Baik/ sangat baik	Sedang	Buruk/ sangat buruk	TT/TJ
GENDER					
Laki-laki	50.1	31.2	32.3	32.4	4.1
Perempuan	49.9	30.1	34.1	27.9	7.8
USIA					
<= 21 tahun	12.0	37.8	28.9	30.4	2.9
22 - 25 tahun	10.9	24.0	29.1	42.5	4.3
26 - 40 tahun	37.3	34.4	30.1	28.4	7.2
41 - 55 tahun	25.2	29.3	34.1	31.7	5.0
> 55 tahun	14.6	22.6	46.3	22.6	8.5
ETNIS					
Jawa	41.1	30.8	34.1	27.9	7.1
Sunda	15.6	28.3	34.9	26.8	10.0
Batak	3.6	26.4	37.3	33.7	2.5
Madura	3.2	36.5	28.9	28.1	6.5
Betawi	2.9	13.4	38.2	48.5	0.0
Minang	2.6	29.5	24.5	43.9	2.2
Bugis	2.6	37.7	43.9	18.0	0.4
Melayu	2.2	26.1	21.7	37.9	14.3
Lainnya	26.1	33.5	31.0	32.4	3.1
AGAMA					
Islam	87.0	28.3	33.3	31.8	6.6
Protestan/Katolik	9.9	48.0	35.1	15.9	0.9
Lainnya	3.1	42.6	24.4	28.1	4.9
PENDIDIKAN					
<= SD	36.7	32.8	33.3	26.7	7.2
SLTP	18.6	28.6	33.6	27.7	10.1
SLTA	30.4	30.9	33.6	32.4	3.1
Kuliah	13.6	27.6	31.8	38.1	2.4
TT.TJ	0.7	22.3	29.1	21.1	27.5

	Base	Baik/ sangat baik	Sedang	Buruk/ sangat buruk	TT/TJ
PEKERJAAN					
Petani/peternak/nelayan	18.7	27.9	42.9	22.2	7.0
Buruh kasar, sopir/ojek, keamanan, warung/PKL, tidak tetap, menganggur	25.7	31.6	28.8	33.5	6.1
Wiraswasta, pengusaha	9.1	42.4	22.2	30.0	5.4
Pegawai (negeri/swasta), Guru/Dosen, Profesional	13.5	24.2	39.4	36.0	0.4
Ibu Rumah Tangga	23.1	28.3	36.8	28.4	6.5
Masih sekolah/kuliah	4.9	41.5	25.5	28.1	4.9
Lainnya	5.0	37.1	16.8	32.8	13.3
PENDAPATAN					
< 1 juta	16.0	34.9	29.8	28.5	6.8
1 - < 2 juta	30.4	39.4	25.0	28.7	6.9
2 - < 4 juta	31.8	26.5	35.6	30.0	7.8
=> 4 juta	21.8	33.7	27.9	36.2	2.3
DESA/KOTA					
Pedesaan	49.9	29.6	35.4	27.6	7.4
Perkotaan	50.1	31.8	31.0	32.6	4.6
WILAYAH					
SUMATERA	20.4	23.3	34.7	35.5	6.5
BANTEN	4.3	16.3	48.9	30.7	4.1
DKI	4.1	33.8	33.4	32.7	0.0
JABAR	17.4	27.0	25.7	36.4	10.9
JATENG DIY	16.1	41.4	31.2	24.0	3.4
JATIM	16.2	23.5	38.7	29.9	7.9
BALI NUSA	5.3	56.4	14.0	26.6	3.0
KALIMANTAN	5.9	44.8	25.7	21.6	7.9
SULAWESI	7.0	26.1	44.1	28.1	1.7
MALUKU PAPUA	3.3	35.9	47.6	16.5	0.0

Evaluasi negative lebih menonjol dari kelompok usia 22-25 tahun, etnis Betawi dan Minang, kalangan pegawai, pendidikan dan pendapatan tinggi, wilayah Sumatera dan Jawa Barat, basis Prabowo – Sandi dan terutama dari Gerindra, PKS dan Demokrat.

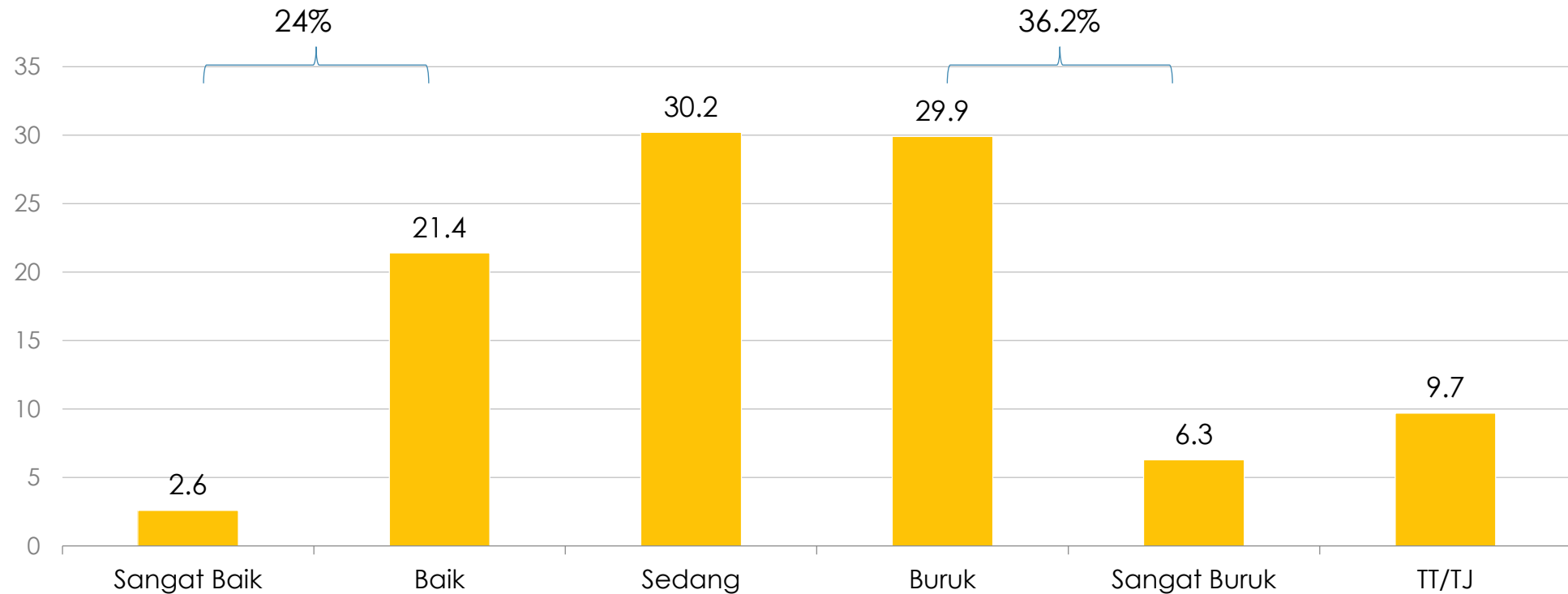
PENEGAKAN HUKUM NASIONAL MENURUT DEMOGRAFI DAN BASIS PEMILU 2019

	Base	Baik/ sangat baik	Sedang	Buruk/ sangat buruk	TT/TJ
BASIS PILEG 2019					
PDIP	19.3	38.6	33.6	23.7	4.1
GERINDRA	12.6	21.0	34.5	41.9	2.6
GOLKAR	12.3	35.1	26.3	33.3	5.3
PKB	9.7	46.8	27.7	23.4	2.1
NASDEM	9.0	38.8	32.7	26.5	2.0
PKS	8.2	16.1	29.0	54.8	0.0
DEMOKRAT	7.8	14.7	32.0	52.0	1.3
PAN	6.8	50.0	25.0	25.0	0.0
PPP	4.5	40.0	20.0	30.0	10.0
LAINNYA	9.7	40.0	20.0	40.0	0.0
BASIS PILPRES 2019					
Jokowi - Ma'ruf Amin	55.5	37.1	33.1	25.5	4.3
Prabowo - Sandi	44.5	20.3	32.3	44.9	2.5

Evaluasi negative lebih menonjol dari kelompok usia 22-25 tahun, etnis Betawi dan Minang, kalangan pegawai, pendidikan dan pendapatan tinggi, wilayah Sumatera dan Jawa Barat, basis Prabowo – Sandi dan terutama dari Gerindra, PKS dan Demokrat.

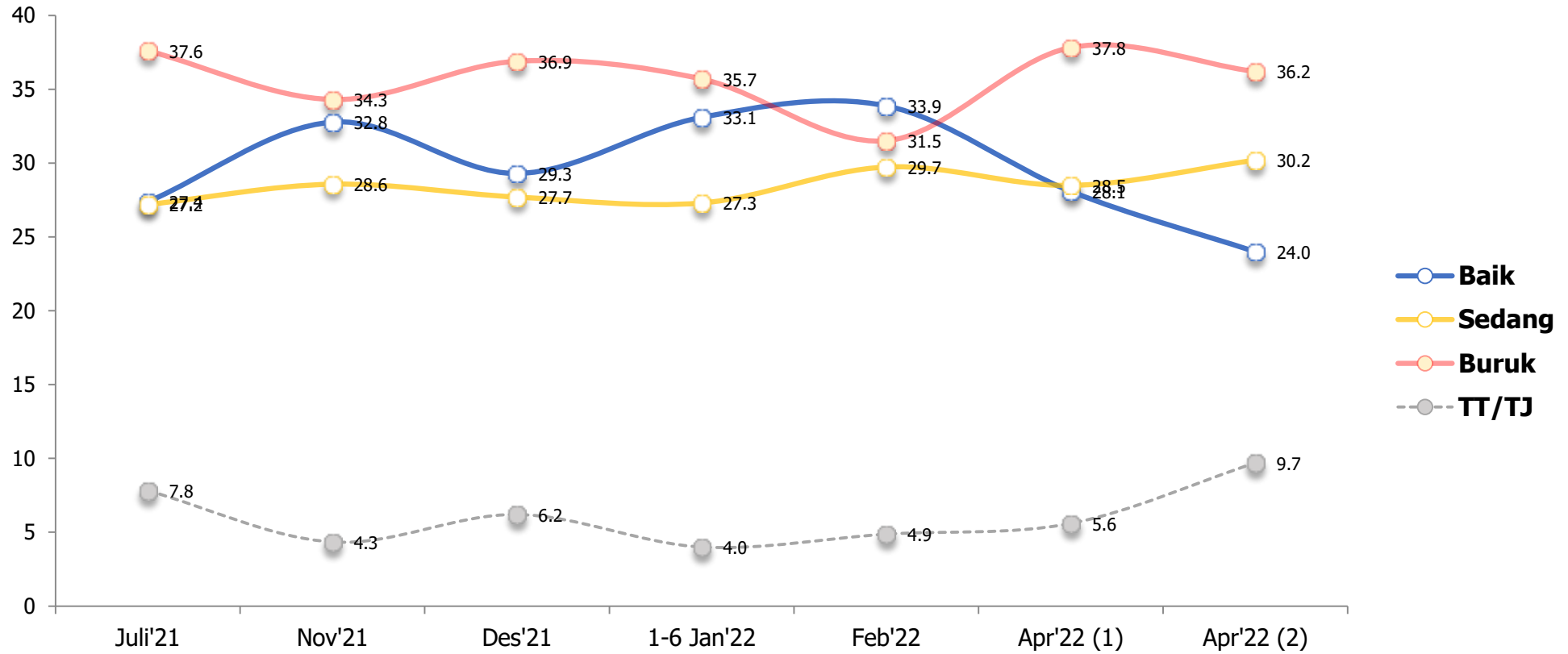
PEMBERANTASAN KORUPSI

Bagaimana Ibu/Bapak melihat keadaan pemberantasan korupsi di negara kita pada umumnya sekarang? sangat baik, baik, sedang, buruk, atau sangat buruk?... (%)



Kebanyakan menilai keadaan pemberantasan korupsi di negara kita pada umumnya sekarang buruk/sangat buruk.

TREN KONDISI PEMBERANTASAN KORUPSI [Hingga 25 April 2022]



Penilaian negatif hampir selalu lebih tinggi ketimbang penilaian positif dalam setahun ke belakang. Di bulan Februari, penilaian positif sedikit di atas penilaian negatif. Tapi pada bulan April, penilaian negatif kembali lebih tinggi ketimbang penilaian positif.



PEMBERANTASAN KORUPSI MENURUT DEMOGRAFI DAN BASIS PEMILU 2019

	Base	Baik/ sangat baik	Sedang	Buruk/ sangat buruk	TT/TJ
GENDER					
Laki-laki	50.2	23.9	25.1	40.8	10.2
Perempuan	49.8	24.1	35.2	31.5	9.2
USIA					
<= 21 tahun	11.0	10.9	27.0	56.0	6.2
22 - 25 tahun	11.9	15.4	36.8	34.8	13.0
26 - 40 tahun	38.1	23.9	30.8	36.4	8.9
41 - 55 tahun	25.0	36.8	23.6	30.6	9.1
> 55 tahun	14.0	19.2	37.2	30.7	12.9
ETNIS					
Jawa	40.3	26.9	34.1	31.1	7.8
Sunda	16.4	24.1	33.2	37.9	4.8
Batak	3.5	20.1	30.4	48.1	1.3
Madura	3.1	11.1	9.9	63.4	15.6
Betawi	3.0	9.8	17.5	65.1	7.6
Minang	2.6	23.4	29.1	42.6	4.8
Bugis	2.7	15.4	18.0	58.1	8.5
Melayu	2.2	24.0	30.5	36.6	8.9
Lainnya	26.2	23.9	27.2	31.9	17.0
AGAMA					
Islam	87.2	23.8	28.7	38.5	8.9
Protestan/Katolik	9.5	20.1	44.6	16.9	18.3
Lainnya	3.3	39.4	27.0	29.0	4.6
PENDIDIKAN					
<= SD	37.4	23.5	36.8	25.2	14.5
SLTP	16.1	29.7	22.3	34.2	13.8
SLTA	33.8	20.2	31.3	42.9	5.5
Kuliah	12.7	21.1	20.0	56.2	2.7

	Base	Baik/ sangat baik	Sedang	Buruk/ sangat buruk	TT/TJ
PEKERJAAN					
Petani/peternak/nelayan	19.0	23.7	20.9	33.9	21.5
Buruh kasar, sopir/ojek, keamanan, warung/PKL, tidak tetap, menganggur	23.8	23.4	31.3	35.5	9.8
Wiraswasta, pengusaha	9.1	24.9	34.6	39.6	0.9
Pegawai (negeri/swasta), Guru/Dosen, Profesional	11.4	20.1	26.1	49.3	4.4
Ibu Rumah Tangga	25.8	26.3	39.9	23.7	10.1
Masih sekolah/kuliah	6.7	8.3	28.1	62.0	1.6
Lainnya	4.2	30.8	11.9	51.6	5.7
PENDAPATAN					
< 1 juta	20.1	20.6	37.3	23.5	18.6
1 - < 2 juta	32.1	15.5	40.4	33.6	10.4
2 - < 4 juta	31.5	29.6	27.6	38.9	3.8
=> 4 juta	16.3	30.7	17.2	49.9	2.1
DESA/KOTA					
Pedesaan	50.3	24.0	32.3	33.4	10.3
Perkotaan	49.7	24.0	28.0	38.9	9.1
WILAYAH					
SUMATERA	20.4	17.4	22.4	44.1	16.1
BANTEN	4.3	21.0	27.6	42.2	9.1
DKI	4.1	35.4	20.5	40.1	4.0
JABAR	17.4	20.7	35.8	39.1	4.4
JATENG DIY	16.1	29.6	24.5	36.2	9.7
JATIM	16.2	21.6	40.4	29.4	8.7
BALI NUSA	5.3	43.5	37.4	12.3	6.8
KALIMANTAN	5.9	26.3	27.7	29.9	16.1
SULAWESI	7.0	23.7	28.2	36.3	11.8
MALUKU PAPUA	3.3	21.0	37.5	41.4	0.0

Evaluasi negatif lebih besar terutama dari kelompok laki-laki, usia semakin muda, etnis selain jawa dan etnis Lainnya, pendidikan dan pendapatan semakin tinggi, orang perkotaan, wilayah Jawa Barat hingga Sumatera dan Maluku Papua.



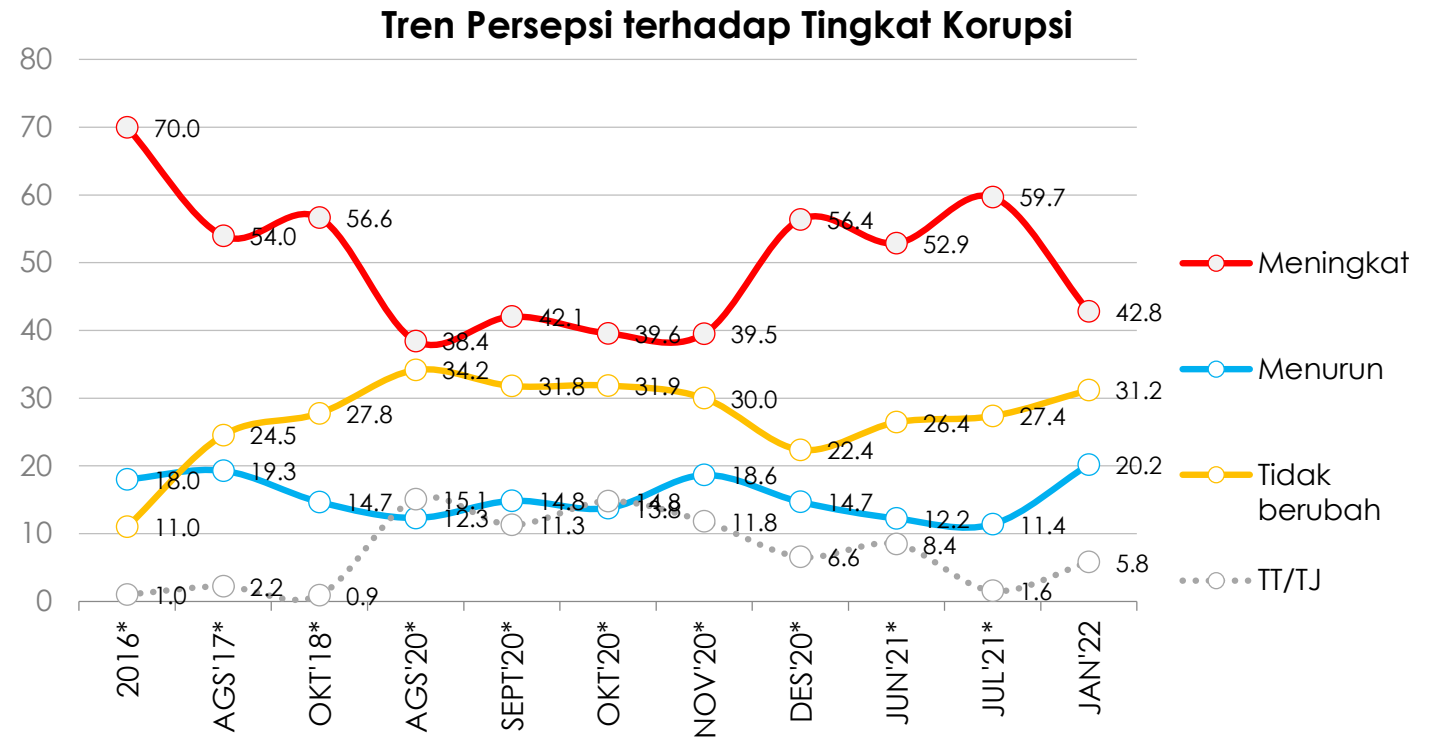
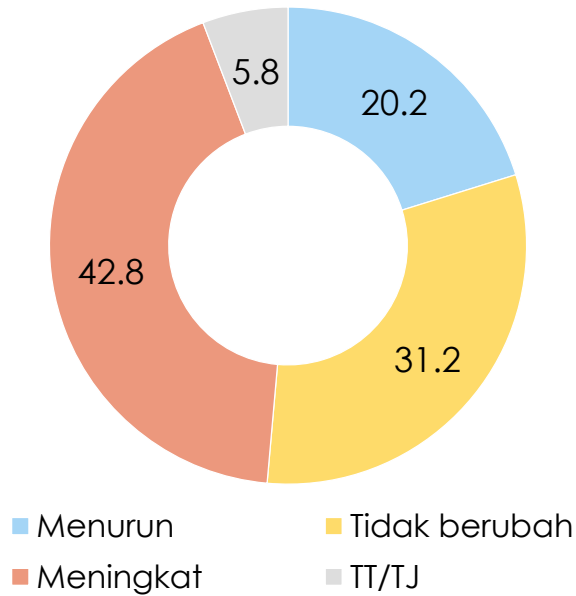
PEMBERANTASAN KORUPSI MENURUT DEMOGRAFI DAN BASIS PEMILU 2019

	Base	Baik/ sangat baik	Sedang	Buruk/ sangat buruk	TT/TJ
BASIS PILEG 2019					
PKB	9.7	63.8	14.5	21.7	0.0
Gerindra	12.6	15.7	25.0	53.0	6.3
PDIP	19.3	25.4	37.1	33.3	4.3
Golkar	12.3	17.0	44.5	28.2	10.4
NasDem	9.0	33.7	10.5	36.0	19.7
PKS	8.2	42.1	21.3	35.8	0.7
PPP	4.5	11.9	2.9	31.6	53.7
PAN	6.8	35.6	31.6	20.7	12.1
Demokrat	7.8	28.8	31.9	34.5	4.9
Lainnya	9.7	44.9	30.7	20.6	3.8
BASIS PILPRES 2019					
Jokowi - Ma'ruf Amin	55.5	26.1	35.5	31.8	6.6
Prabowo - Sandi	44.5	23.2	25.4	45.0	6.4

Terutama basis Gerindra dan Prabowo – Sandi pada pemilu 2019.

KORUPSI DI INDONESIA DUA TAHUN TERAKHIR

Dalam dua tahun terakhir, bagaimana menurut Ibu/Bapak tingkat korupsi di Indonesia saat ini, apakah meningkat, menurun, atau tidak mengalami perubahan?... (%)



* Sumber: LSI - CEGAH

Di awal tahun 2022, mayoritas publik menilai tingkat korupsi di Indonesia meningkat (42.8%) atau tidak berubah (31.2%). Sementara yang menilai menurun hanya sekitar 20.2%.

Persepsi negatif menurun tahun 2020, meningkat di tahun 2021, dan kembali menurun di awal tahun 2022.

KORUPSI DI INDONESIA DUA TAHUN TERAKHIR MENURUT DEMOGRAFI DAN BASIS PILPRES 2019

	Base	Menurun	Tidak berubah	Meningkat	TT/TJ		Base	Menurun	Tidak berubah	Meningkat	TT/TJ
GENDER						PENDIDIKAN					
Laki-laki	49.9	24.0	31.6	40.6	3.8	<= SD	25.6	20.1	36.8	31.9	11.3
Perempuan	50.1	16.5	30.9	44.9	7.7	SLTP	18.9	22.4	30.4	42.9	4.3
USIA						PEKERJAAN					
<= 21 tahun	11.7	17.4	30.2	50.6	1.8	SLTA	42.5	18.1	29.0	49.1	3.9
22 - 25 tahun	11.1	18.7	20.2	57.8	3.3	Kuliah	13.0	24.3	29.0	43.3	3.3
26 - 40 tahun	36.6	17.5	32.6	44.0	5.9	PEKERJAAN					
41 - 55 tahun	25.3	24.6	32.5	37.7	5.1	Petani/peternak/nelayan	14.0	21.5	33.0	40.9	4.7
> 55 tahun	15.3	22.7	34.7	31.3	11.4	Buruh kasar, sopir/ojek, keamanan, warung/PKL, tidak tetap, menganggur	26.8	19.7	32.7	41.4	6.2
ETNIS						PENDAPATAN					
Jawa	41.2	18.6	31.0	44.1	6.3	Wiraswasta, pengusaha	9.9	29.0	27.7	38.6	4.7
Sunda	15.5	20.4	33.4	40.6	5.6	Pegawai (negeri/swasta), Guru/Dosen, Profesional	12.2	19.8	34.8	43.5	1.9
Batak	3.3	41.8	32.0	22.5	3.7	Ibu Rumah Tangga	26.4	16.5	31.6	43.4	8.5
Madura	3.1	11.1	46.5	39.4	3.0	Masih sekolah/kuliah	7.1	15.8	25.8	54.4	4.0
Betawi	2.9	15.0	38.3	43.7	3.0	Lainnya	3.6	32.3	19.0	41.6	7.2
Minang	2.9	5.7	30.6	61.6	2.1	PENDAPATAN					
Bugis	2.8	17.3	55.9	24.8	2.1	< 1 juta	15.0	21.3	33.0	37.6	8.2
Melayu	2.4	14.8	31.0	49.9	4.3	1 - < 2 juta	30.0	21.1	28.9	41.3	8.7
Lainnya	25.9	24.1	25.1	43.9	7.0	2 - < 4 juta	33.2	20.0	31.9	43.6	4.5
AGAMA						PENDAPATAN					
Islam	87.4	17.8	31.7	44.5	6.0	=> 4 juta	21.8	18.5	32.3	47.0	2.2
Protestan/Katolik	10.0	34.2	34.6	28.1	3.1						
Lainnya	2.6	49.0	3.7	39.1	8.2						

Mayoritas publik menilai tingkat korupsi di Indonesia meningkat atau tidak berubah di tiap lapisan sosio-demografi warga, wilayah dan basis pilpres 2019. Yang menilai meningkat terutama kelompok perempuan, usia 40 tahun ke bawah, etnis Minang, Melayu dan Jawa, orang Islam, pendidikan dan pendapatan menengah atas, orang pedesaan, wilayah Kalimantan, Sumatera dan Jawa Timur, dan basis Prabowo – Sandi pada pemilu 2019.

KORUPSI DI INDONESIA DUA TAHUN TERAKHIR MENURUT DEMOGRAFI DAN BASIS PILPRES 2019

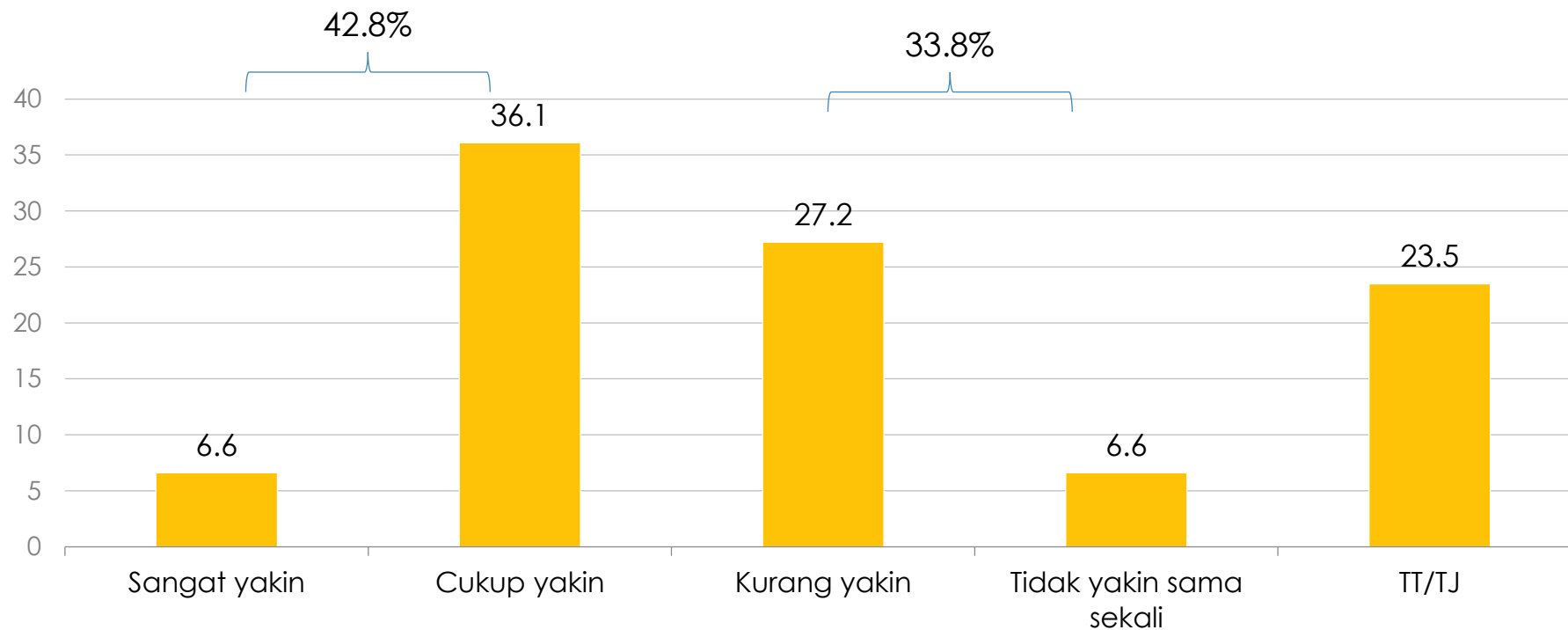
	Base	Menurun	Tidak berubah	Meningkat	TT/TJ		Base	Menurun	Tidak berubah	Meningkat	TT/TJ
DESA/KOTA						BASIS PILPRES 2019					
Pedesaan	50.4	17.6	32.2	44.2	6.0	Jokowi - Ma'ruf Amin	55.5	23.9	32.9	36.3	7.0
Perkotaan	49.6	22.8	30.3	41.3	5.6	Prabowo - Sandi	44.5	14.7	29.5	51.1	4.7
WILAYAH											
SUMATERA	20.4	18.8	30.2	47.0	4.1						
BANTEN	4.3	27.0	28.0	43.2	1.8						
DKI	4.1	23.6	33.5	42.9	0.0						
JABAR	17.4	16.9	35.9	41.6	5.6						
JATENG DIY	16.1	18.1	30.8	43.1	8.0						
JATIM	16.2	16.1	32.8	47.4	3.7						
BALI NUSA	5.3	29.2	23.8	36.5	10.4						
KALIMANTAN	5.9	20.3	18.7	59.0	2.0						
SULAWESI	7.0	29.9	37.9	24.0	8.2						
MALUKU PAPUA	3.3	28.4	29.0	19.1	23.4						

Mayoritas publik menilai tingkat korupsi di Indonesia meningkat atau tidak berubah di tiap lapisan sosio-demografi warga, wilayah dan basis pilpres 2019. Yang menilai meningkat terutama kelompok perempuan, usia 40 tahun ke bawah, etnis Minang, Melayu dan Jawa, orang Islam, pendidikan dan pendapatan menengah atas, orang pedesaan, wilayah Kalimantan, Sumatera dan Jawa Timur, dan basis Prabowo – Sandi pada pemilu 2019.

KASUS-KASUS KORUPSI

KASUS MEGA KORUPSI BANK CENTURY

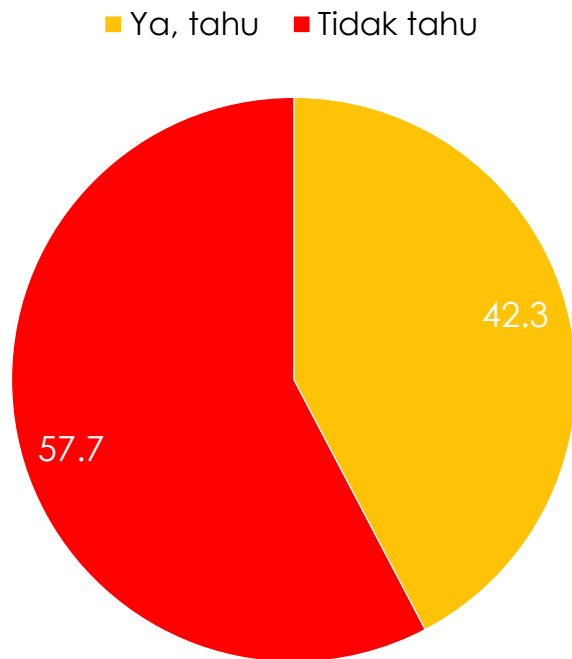
Kasus mega korupsi Bank Century diduga melibatkan banyak pihak dan hingga saat ini baru menjebloskan satu pelaku ke dalam penjara. Seberapa yakin Ibu/Bapak KPK akan mampu menuntaskan kasus mega korupsi Bank Century tersebut?... (%)



Di antara warga yang bisa menjawab, sebagian besar cukup/sangat yakin.

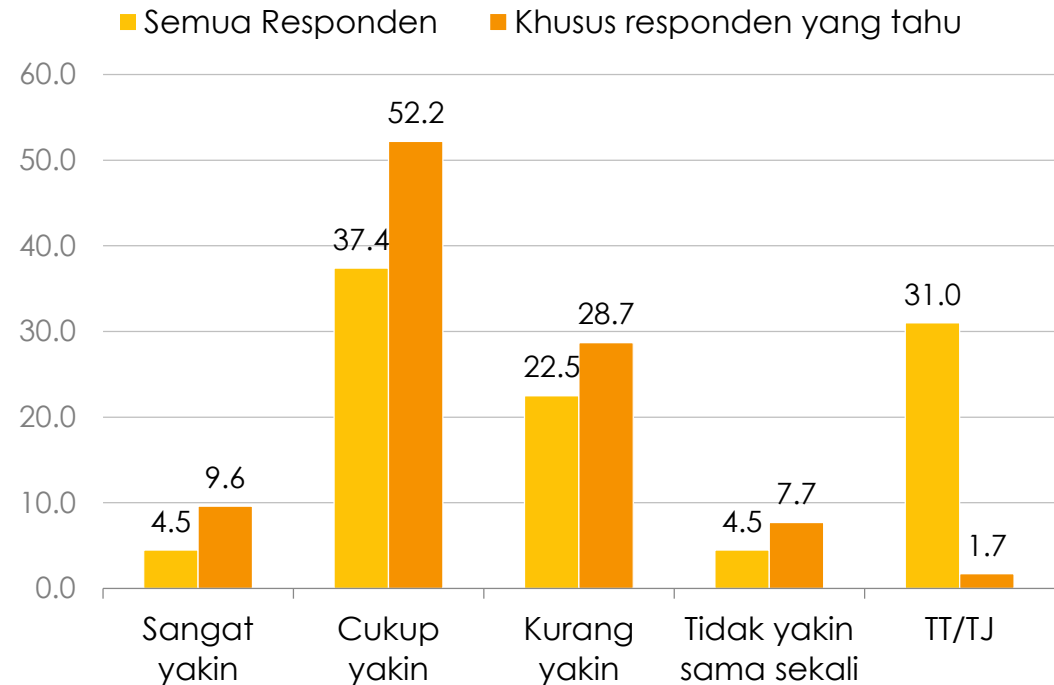
KASUS DJOKO TJANDRA

Apakah Ibu/Bapak tahu atau pernah dengar tentang kasus Djoko Tjandra yang ditangani oleh Kepolisian, yaitu pelaku tindak pidana korupsi dan suap yang juga banyak melibatkan aparat penegak hukum?... (%)



Sekitar 42.3% tahu kasus tersebut, dari yang tahu mayoritas cukup/sangat yakin Kepolisian telah menuntaskan dan mengungkap seluruh pihak yang terlibat dalam kasus korupsi dan suap Djoko Tjandra.

Baru beberapa tahun ke belakang Djoko Tjandra berhasil ditangkap setelah belasan tahun berstatus buron. Seberapa yakin Ibu/Bapak Kepolisian telah menuntaskan dan mengungkap seluruh pihak yang terlibat dalam kasus korupsi dan suap Djoko Tjandra?... (%)

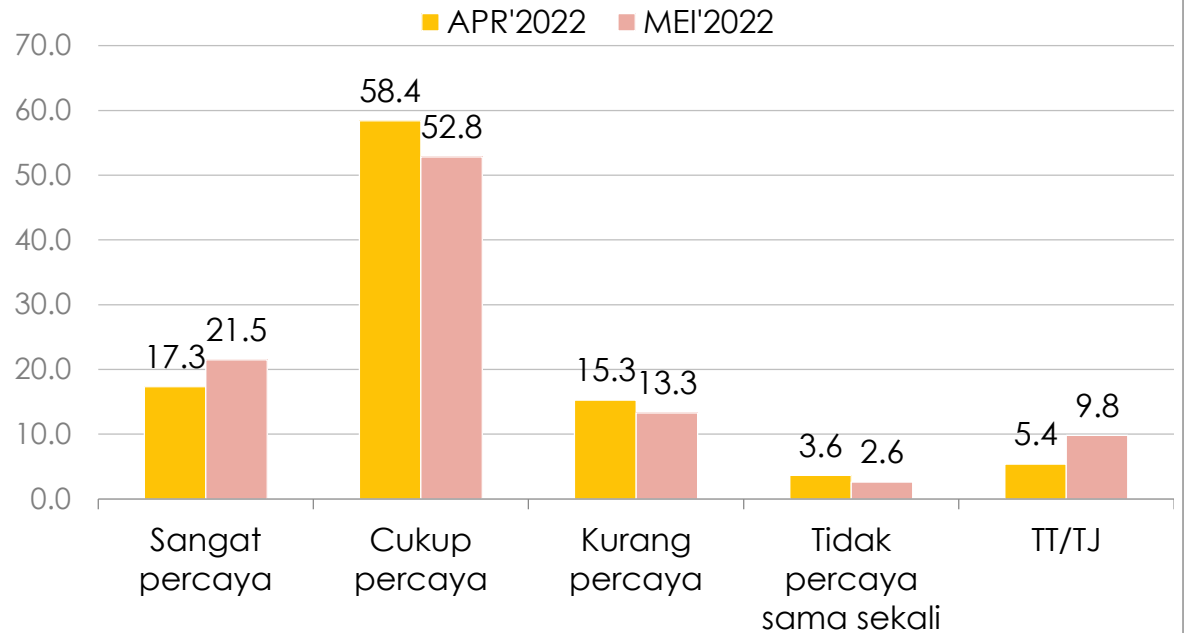
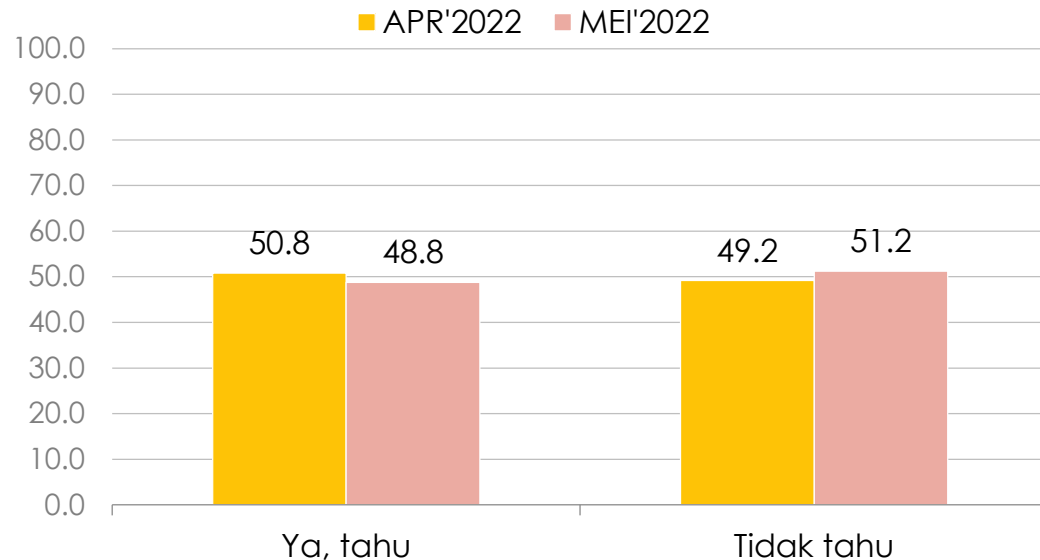


DIRJEN PERDAGANGAN LUAR NEGERI TERSANGKA DUGAAN KORUPSI EKSPOR MINYAK GORENG

Apakah Ibu/Bapak tahu atau pernah dengar Jaksa Agung ST Burhanuddin mengumumkan bahwa Dirjen Perdagangan Luar Negeri di Kementerian Perdagangan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak goreng (yang dalam beberapa bulan terakhir menjadi penyebab kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di tanah air)?... (%)

Seberapa percaya Ibu/Bapak bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi yang melibatkan Dirjen Perdagangan Luar Negeri di Kementerian Perdagangan tersebut?... (%)

(Base: Tahu Dirjen Perdagangan Luar Negeri menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak goreng)



Sekitar separuh warga tahu, dari yang tahu mayoritas cukup/sangat percaya bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi yang melibatkan Dirjen Perdagangan Luar Negeri di Kementerian Perdagangan tersebut, lebih dari 70%.

JAKSA AGUNG MENGUMUMKAN BAHWA DIRJEN PERDAGANGAN LUAR NEGERI TERSANGKA DUGAAN KORUPSI EKSPOR MINYAK GORENG

	BASE	Tahu Jaksa Agung mengumumkan tersangka dugaan korupsi ekspor minyak goreng		Percaya bahwa Dirjen perdagangan luar negeri terlibat dugaan korupsi minyak goreng		
		Ya, tahu	Tidak tahu	Sangat+Cukup percaya	Kurang+Tidak percaya sama sekali	TT/TJ
GENDER						
Laki-laki	50.1	46.7	53.3	81.1	13.8	5.2
Perempuan	49.9	50.9	49.1	68.0	17.9	14.1
USIA						
<= 21 tahun	12.0	49.7	50.3	80.1	18.0	1.8
22 - 25 tahun	10.9	46.3	53.7	78.3	12.0	9.7
26 - 40 tahun	37.3	54.7	45.3	74.4	16.6	9.0
41 - 55 tahun	25.2	44.6	55.4	60.5	23.3	16.2
> 55 tahun	14.6	42.0	58.0	90.2	1.2	8.6
ETNIS						
Jawa	41.1	46.1	53.9	74.4	13.9	11.7
Sunda	15.6	43.4	56.6	66.8	21.9	11.3
Batak	3.6	47.3	52.7	87.5	12.5	0.0
Madura	3.2	57.7	42.3	32.8	67.2	0.0
Betawi	2.9	57.2	42.8	76.8	9.0	14.2
Minang	2.6	66.7	33.3	73.7	19.8	6.6
Bugis	2.6	53.3	46.7	61.0	9.5	29.6
Melayu	2.2	51.8	48.2	87.5	10.6	1.9
Lainnya	26.1	51.8	48.2	81.8	10.7	7.5
AGAMA						
Islam	87.0	47.7	52.3	74.7	16.4	8.9
Protestan/Katolik	9.9	59.8	40.2	77.7	4.0	18.3
Lainnya	3.1	43.3	56.7	45.2	54.8	0.0

JAKSA AGUNG MENGUMUMKAN BAHWA DIRJEN PERDAGANGAN LUAR NEGERI TERSANGKA DUGAAN KORUPSI EKSPOR MINYAK GORENG

	BASE	Tahu Jaksa Agung mengumumkan tersangka dugaan korupsi ekspor minyak goreng		Percaya bahwa Dirjen perdagangan luar negeri terlibat dugaan korupsi minyak goreng		
		Ya, tahu	Tidak tahu	Sangat+Cukup percaya	Kurang+Tidak percaya sama sekali	TT/TJ
PENDIDIKAN						
<= SD	36,7	37,6	62,4	58,7	21,2	20,1
SLTP	18,6	43,4	56,6	81,3	13,6	5,1
SLTA	30,4	56,0	44,0	78,3	15,4	6,2
Kuliah	13,6	70,8	29,2	82,9	11,6	5,5
Tidak Menjawab	0,7	37,5	62,5	100,0	0,0	0,0
PEKERJAAN						
Petani/peternak/nelayan	18,7	40,7	59,3	90,9	3,4	5,6
Buruh kasar, sopir/ojek, keamanan, warung/PKL, tidak tetap, menganggur	25,7	42,0	58,0	67,6	22,1	10,3
Wiraswasta, pengusaha	9,1	59,9	40,1	72,6	18,4	9,0
Pegawai (negeri/swasta), Guru/Dosen, Profesional	13,5	68,2	31,8	85,7	12,5	1,8
Ibu Rumah Tangga	23,1	49,6	50,4	57,8	21,4	20,8
Masih sekolah/kuliah	4,9	49,1	50,9	87,3	11,3	1,4
Lainnya	5,0	36,2	63,8	80,5	7,2	12,3
PENDAPATAN						
< 1 juta	16,0	40,9	59,1	67,1	20,9	11,9
1 - < 2 juta	30,4	46,0	54,0	64,1	18,1	17,8
2 - < 4 juta	31,8	55,6	44,4	78,5	15,7	5,9
=> 4 juta	21,8	66,1	33,9	86,7	9,1	4,1

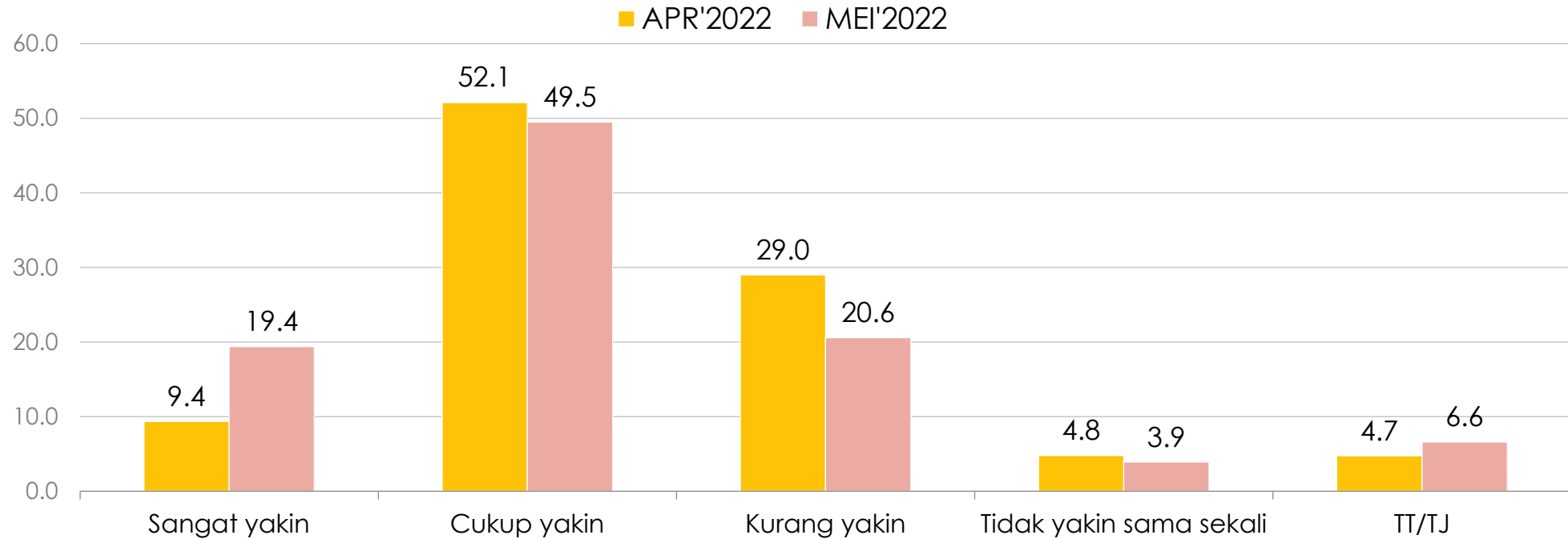
JAKSA AGUNG MENGUMUMKAN BAHWA DIRJEN PERDAGANGAN LUAR NEGERI TERSANGKA DUGAAN KORUPSI EKSPOR MINYAK GORENG

	BASE	Tahu Jaksa Agung mengumumkan tersangka dugaan korupsi ekspor minyak goreng		Percaya bahwa Dirjen perdagangan luar negeri terlibat dugaan korupsi minyak goreng		
		Ya, tahu	Tidak tahu	Sangat+Cukup percaya	Kurang+Tidak percaya sama sekali	TT/TJ
DESA/KOTA						
Pedesaan	49,9	45,8	54,2	78,7	13,2	8,1
Perkotaan	50,1	51,7	48,3	70,4	18,3	11,3
WILAYAH						
SUMATERA	20,4	57,7	42,3	82,8	11,6	5,7
BANTEN	4,3	47,4	52,6	76,8	14,9	8,3
DKI	4,1	64,7	35,3	92,1	5,6	2,3
JABAR	17,4	50,3	49,7	71,3	17,6	11,2
JATENG DIY	16,1	42,2	57,8	70,3	17,6	12,0
JATIM	16,2	41,8	58,2	57,9	30,4	11,6
BALI NUSA	5,3	49,1	50,9	59,5	14,7	25,7
KALIMANTAN	5,9	33,4	66,6	72,5	22,3	5,3
SULAWESI	7,0	47,0	53,0	76,2	7,9	15,8
MALUKU PAPUA	3,3	64,2	35,8	97,1	2,9	0,0

Di antara warga yang tahu, mayoritas percaya telah terjadi tindak pidana korupsi di tiap lapisan demografi masyarakat.

KEJAKSAAN AGUNG AKAN MENUNTASKAN KASUS KORUPSI PEMBERIAN FASILITAS EKSPOR MINYAK GORENG

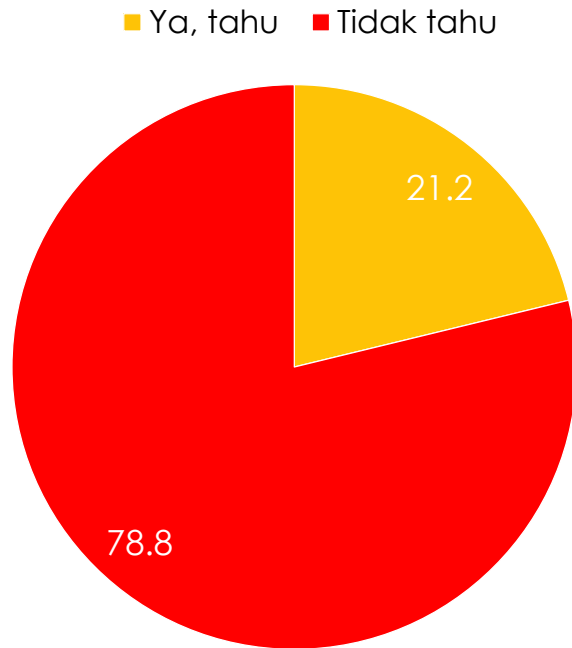
Seberapa yakin Ibu/Bapak Kejaksaan Agung akan menuntaskan kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak goreng tersebut?... (%)
(Base: Tahu Dirjen Perdagangan Luar Negeri menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak goreng)



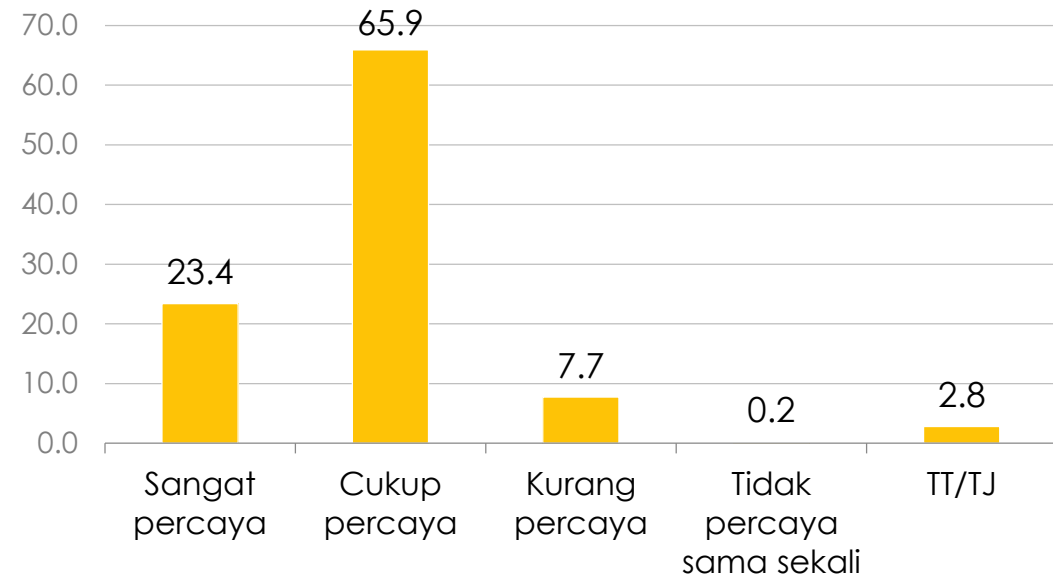
Mayoritas cukup/sangat yakin Kejaksaan Agung akan menuntaskan kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak goreng tersebut, dan disbanding temuan sebelumnya tingkat keyakinan warga cenderung menguat.

LIN CHE WEI

Apakah Ibu/Bapak tahu atau pernah dengar Kejaksaan Agung baru saja menetapkan Lin Che Wei (seorang Ekonom dan Analis/Penasehat Kebijakan) sebagai tersangka karena diduga berkolusi dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri dalam mengkondisikan izin ekspor minyak goreng di beberapa perusahaan?... (%)



Seberapa percaya Ibu/Bapak bahwa telah terjadi pemufakatan jahat antara Lin Che Wei dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri dalam mengkondisikan izin ekspor minyak goreng tersebut?... (%)
(Base: Tahu Kejaksaan Agung baru saja menetapkan Lin Che Wei sebagai tersangka)

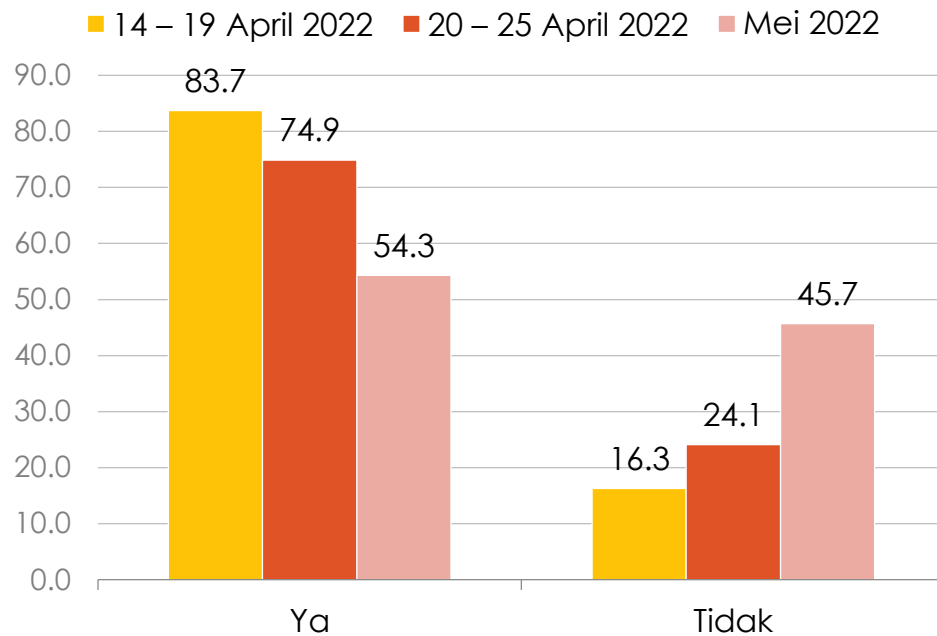


Sekitar 21.2% tahu Kejaksaan Agung baru saja menetapkan Lin Che Wei sebagai tersangka karena diduga berkolusi dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri, dan dari yang tahu mayoritas percaya bahwa telah terjadi pemufakatan jahat antara Lin Che Wei dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri dalam mengkondisikan izin ekspor minyak goreng tersebut.

DAMPAK KASUS KORUPSI EKSPOR MINYAK GORENG

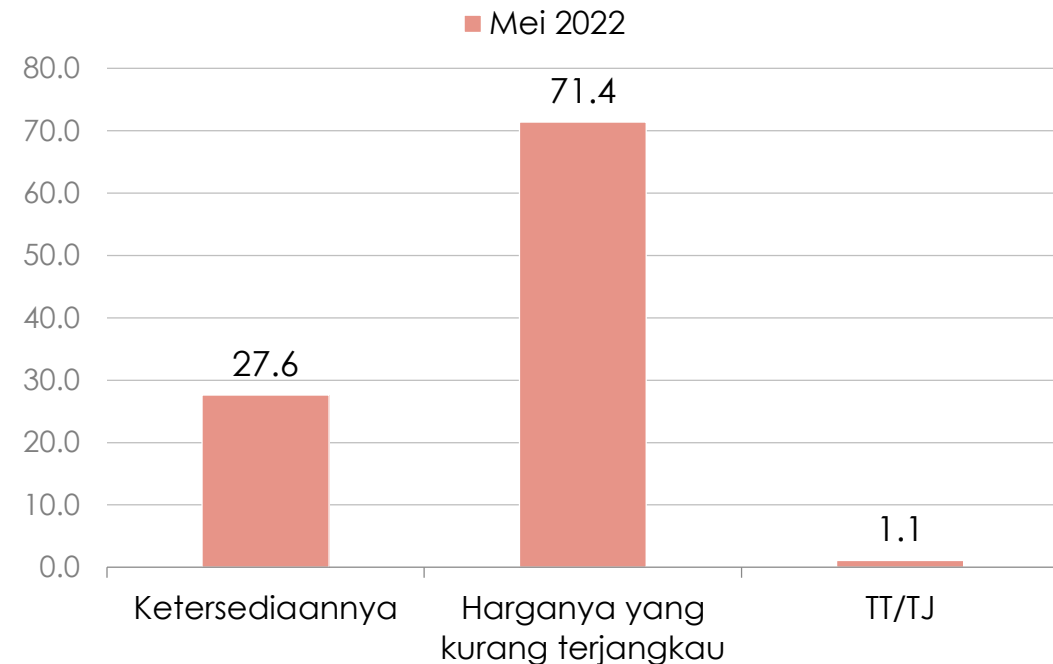
MENGALAMI KESULITAN MENDAPATKAN MINYAK GORENG

Apakah Ibu/Bapak mengalami kesulitan mendapat minyak goreng dalam beberapa waktu terakhir ini?... (%)



Jika masih mengalami (terjadi), apakah lebih karena ketersediaannya yang terbatas atau harganya kurang terjangkau?... (%)

(Base: Masih mengalami kesulitan)



Mayoritas warga terdampak kasus minyak goreng. Pada dua minggu pertama di bulan April, sekitar 83-84% warga mengalami kesulitan mendapat minyak goreng. Sebulan berikutnya menurun sangat cepat, tapi mayoritas masih mengalami kesulitan (54.3%), yaitu terutama karena harga yang kurang terjangkau.

MENGALAMI KESULITAN MENDAPATKAN MINYAK GORENG MENURUT DEMOGRAFI DAN WILAYAH

	BASE	Ya	Tidak	Ketersedi aannya	Harganya yang kurang terjangkau	TT/TJ
GENDER						
Laki-laki	50.1	58.5	41.5	33.1	65.7	1.2
Perempuan	49.9	50.1	49.9	21.1	78.1	0.9
USIA						
<= 21 tahun	12.0	55.1	44.9	36.5	63.5	0.0
22 - 25 tahun	10.9	54.3	45.7	12.3	87.7	0.0
26 - 40 tahun	37.3	53.3	46.7	29.7	68.8	1.5
41 - 55 tahun	25.2	48.7	51.3	20.0	77.7	2.3
> 55 tahun	14.6	65.9	34.1	36.0	64.0	0.0
ETNIS						
Jawa	41.1	53.1	46.9	28.0	71.7	0.3
Sunda	15.6	59.3	40.7	28.6	71.4	0.0
Batak	3.6	38.1	61.9	66.8	33.2	0.0
Madura	3.2	48.6	51.4	0.0	100.0	0.0
Betawi	2.9	49.1	50.9	16.2	83.8	0.0
Minang	2.6	67.7	32.3	39.0	61.0	0.0
Bugis	2.6	49.5	50.5	19.6	80.4	0.0
Melayu	2.2	66.2	33.8	22.8	76.6	0.7
Lainnya	26.1	54.8	45.2	26.4	70.2	3.5
AGAMA						
Islam	87.0	55.2	44.8	29.0	70.3	0.7
Protestan/Katolik	9.9	55.0	45.0	12.6	82.9	4.5
Lainnya	3.1	27.3	72.7	42.6	57.4	0.0

Mayoritas (lebih dari 50%) mengalami kesulitan mendapatkan minyak goreng di hampir setiap kelompok demografi, kecuali di kelompok sosial ekonomi yang semakin tinggi, dan di wilayah DKI dan Kalimantan.

	BASE	Ya	Tidak	Ketersedi aannya	Harganya yang kurang terjangkau	TT/TJ
PENDIDIKAN						
<= SD	36.7	60.6	39.4	27.5	72.5	0.0
SLTP	18.6	48.2	51.8	30.9	66.4	2.7
SLTA	30.4	54.2	45.8	24.7	74.1	1.1
Kuliah	13.6	48.3	51.7	30.6	67.3	2.1
Tidak Menjawab	0.7	6.0	94.0	0.0	100.0	0.0
PEKERJAAN						
Petani/peternak/nelayan	18.7	60.6	39.4	22.2	75.6	2.2
Buruh kasar, sopir/ojek, keamanan, warung/PKL, tidak tetap, menganggur	25.7	53.5	46.5	26.0	73.7	0.3
Wiraswasta, pengusaha	9.1	48.2	51.8	40.9	59.1	0.0
Pegawai (negeri/swasta), Guru/Dosen, Profesional	13.5	49.6	50.4	38.5	60.3	1.1
Ibu Rumah Tangga	23.1	53.0	47.0	18.9	80.3	0.8
Masih sekolah/kuliah	4.9	61.0	39.0	18.5	77.6	3.8
Lainnya	5.0	57.9	42.1	60.8	39.2	0.0
PENDAPATAN						
< 1 juta	16.0	70.2	29.8	18.2	81.8	0.0
1 - < 2 juta	30.4	51.7	48.3	31.0	69.0	0.0
2 - < 4 juta	31.8	45.0	55.0	26.2	73.4	0.4
=> 4 juta	21.8	50.0	50.0	38.3	59.7	2.0

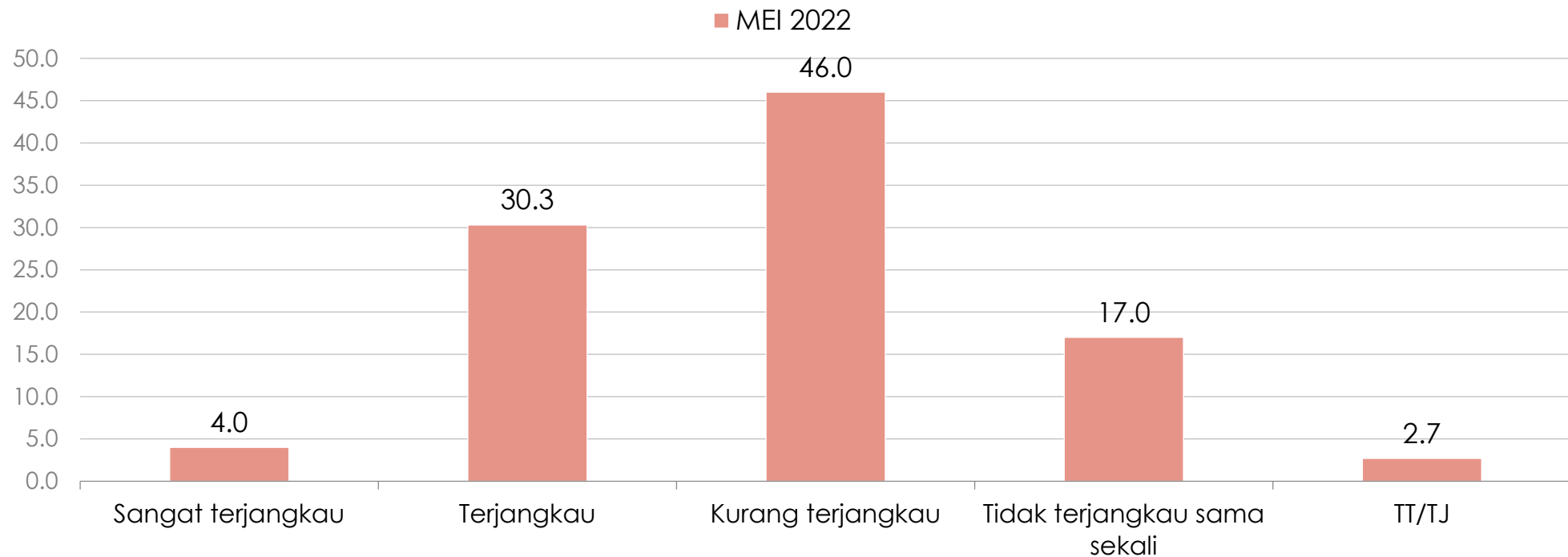
MENGALAMI KESULITAN MENDAPATKAN MINYAK GORENG MENURUT DEMOGRAFI DAN WILAYAH

	BASE	Ya	Tidak	Ketersedi aannya	Harganya yang kurang terjangkau	TT/TJ
DESA/KOTA						
Pedesaan	49.9	55.3	44.7	24.5	74.0	1.5
Perkotaan	50.1	53.4	46.6	30.7	68.7	0.6
WILAYAH						
SUMATERA	20.4	59.6	40.4	39.7	59.4	0.9
BANTEN	4.3	65.0	35.0	9.1	90.9	0.0
DKI	4.1	41.8	58.2	30.4	63.0	6.6
JABAR	17.4	53.6	46.4	23.3	75.9	0.7
JATENG DIY	16.1	51.0	49.0	44.5	55.5	0.0
JATIM	16.2	56.0	44.0	11.3	88.7	0.0
BALI NUSA	5.3	60.5	39.5	32.4	66.4	1.2
KALIMANTAN	5.9	40.2	59.8	32.3	67.7	0.0
SULAWESI	7.0	53.3	46.7	15.1	84.9	0.0
MALUKU PAPUA	3.3	51.8	48.2	8.5	77.3	14.2

Mayoritas (lebih dari 50%) mengalami kesulitan mendapatkan minyak goreng di hampir setiap kelompok demografi, kecuali di kelompok sosial ekonomi yang semakin tinggi, dan di wilayah DKI dan Kalimantan.

HARGA MINYAK GORENG SAAT INI

Secara umum apakah Ibu/Bapak merasa harga minyak goreng saat ini sangat terjangkau, terjangkau, kurang terjangkau atau tidak terjangkau sama sekali?... (%)



Secara umum mayoritas warga merasa harga minyak goreng saat ini masih kurang/tidak terjangkau sama sekali, lebih dari 60%.

HARGA MINYAK GORENG SAAT INI MENURUT DEMOGRAFI DAN WILAYAH

	BASE	Sangat terjangkau+terjangkau	Kurang+Tidak terjangkau sama sekali	TT/TJ
GENDER				
Laki-laki	50.1	36.8	59.3	3.9
Perempuan	49.9	31.9	66.7	1.5
USIA				
<= 21 tahun	12.0	31.5	65.7	2.8
22 - 25 tahun	10.9	31.7	62.7	5.6
26 - 40 tahun	37.3	33.3	64.6	2.1
41 - 55 tahun	25.2	40.1	56.7	3.2
> 55 tahun	14.6	31.6	67.6	0.8
ETNIS				
Jawa	41.1	33.2	64.7	2.1
Sunda	15.6	39.3	59.9	0.8
Batak	3.6	25.0	65.9	9.1
Madura	3.2	33.4	55.2	11.4
Betawi	2.9	56.7	41.0	2.4
Minang	2.6	16.7	77.7	5.7
Bugis	2.6	35.1	64.0	1.0
Melayu	2.2	18.5	80.6	0.9
Lainnya	26.1	35.2	62.1	2.8
AGAMA				
Islam	87.0	35.2	62.6	2.2
Protestan/Katolik	9.9	30.9	65.8	3.3
Lainnya	3.1	21.7	64.5	13.9

	BASE	Sangat terjangkau+terjangkau	Kurang+Tidak terjangkau sama sekali	TT/TJ
PENDIDIKAN				
<= SD	36.7	35.4	61.8	2.8
SLTP	18.6	33.1	65.8	1.1
SLTA	30.4	35.0	62.8	2.2
Kuliah	13.6	31.7	63.5	4.8
Tidak Menjawab	0.7	38.4	44.3	17.3
PEKERJAAN				
Petani/peternak/nelayan	18.7	32.0	65.1	2.9
Buruh kasar, sopir/ojek, keamanan, warung/PKL, tidak tetap, menganggur	25.7	29.8	68.1	2.1
Wiraswasta, pengusaha	9.1	54.7	43.3	2.0
Pegawai (negeri/swasta), Guru/Dosen, Profesional	13.5	39.3	58.3	2.4
Ibu Rumah Tangga	23.1	33.6	64.3	2.0
Masih sekolah/kuliah	4.9	29.4	65.1	5.5
Lainnya	5.0	22.8	73.2	4.0
PENDAPATAN				
< 1 juta	16.0	22.3	73.8	3.9
1 - < 2 juta	30.4	32.9	65.9	1.2
2 - < 4 juta	31.8	36.3	63.1	0.6
=> 4 juta	21.8	40.5	56.2	3.3

Mayoritas masih merasa harga minyak goreng kurang/tidak terjangkau sama sekali di hampir setiap kelompok demografi dan wilayah, kecuali kalangan pengusaha dan di sekitar wilayah DKI dan Maluku Papua.

HARGA MINYAK GORENG SAAT INI MENURUT DEMOGRAFI DAN WILAYAH

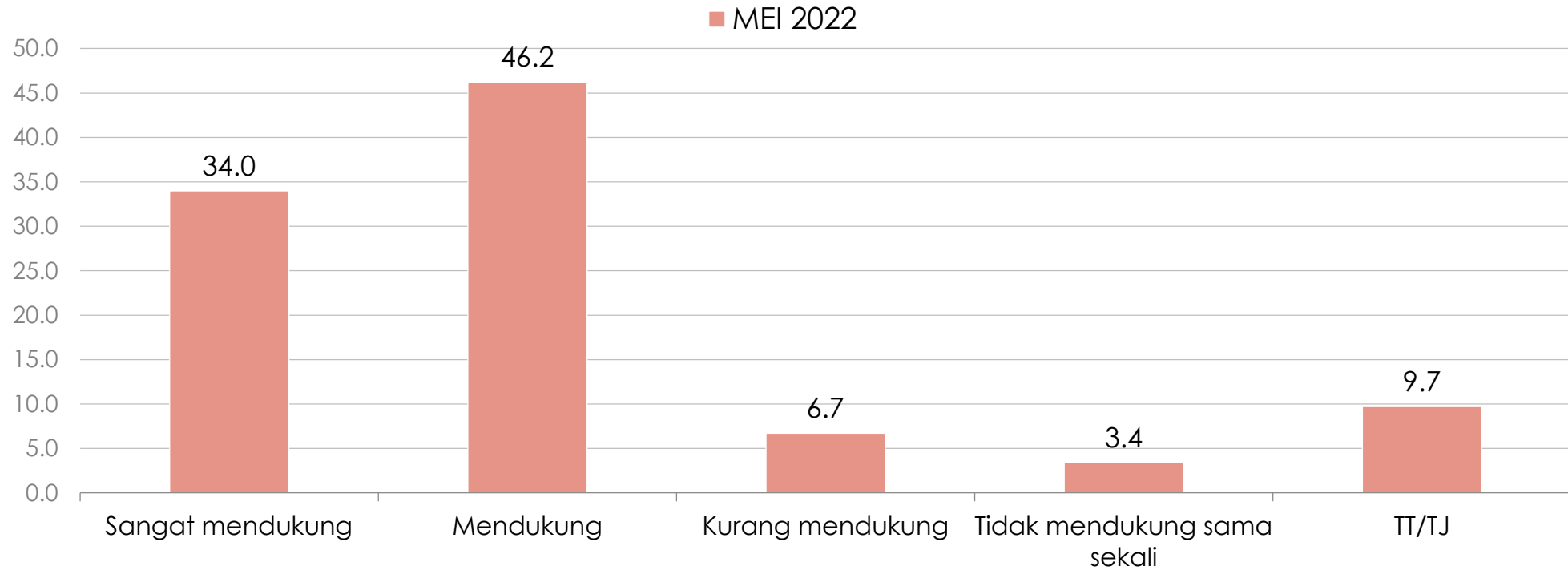
	BASE	Sangat terjangkau+terjangkau	Kurang+Tidak terjangkau sama sekali	TT/TJ
DESA/KOTA				
Pedesaan	49.9	34.0	64.2	1.8
Perkotaan	50.1	34.7	61.7	3.6
WILAYAH				
SUMATERA	20.4	23.8	74.9	1.3
BANTEN	4.3	28.8	69.1	2.2
DKI	4.1	52.8	43.7	3.5
JABAR	17.4	37.7	60.5	1.8
JATENG DIY	16.1	38.1	60.2	1.7
JATIM	16.2	30.7	65.4	3.9
BALI NUSA	5.3	26.2	67.2	6.6
KALIMANTAN	5.9	31.3	64.0	4.7
SULAWESI	7.0	45.9	49.4	4.6
MALUKU PAPUA	3.3	60.0	40.0	0.0

Mayoritas masih merasa harga minyak goreng kurang/tidak terjangkau sama sekali di hampir setiap kelompok demografi dan wilayah, kecuali kalangan pengusaha dan di sekitar wilayah DKI dan Maluku Papua.

POLITICAL WILL DAN DUKUNGAN PUBLIK TERHADAP PENEGAKAN HUKUM

DUKUNGAN PADA KEJAKSAAN AGUNG UNTUK MENUNTASKAN KASUS KORUPSI MINYAK GORENG

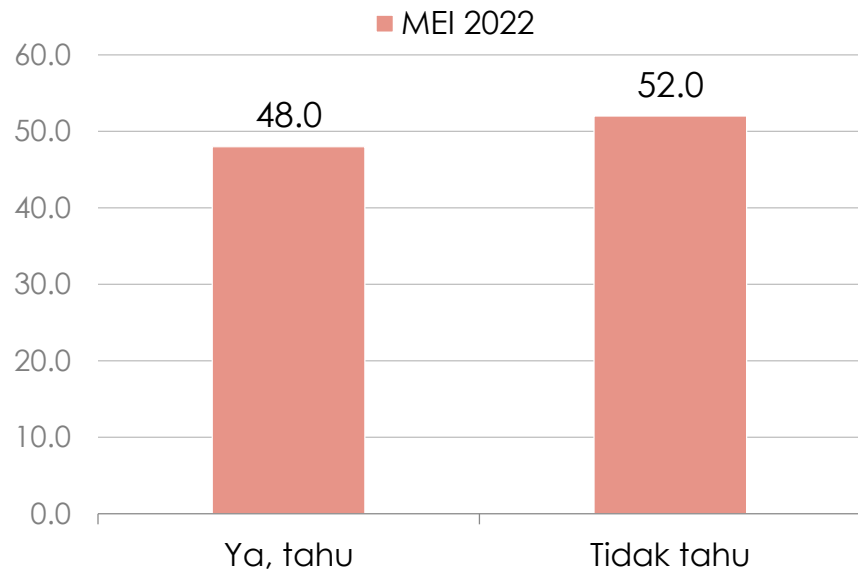
Apakah Ibu/Bapak sangat mendukung, mendukung, kurang mendukung atau tidak mendukung sama sekali Kejaksaan Agung menuntaskan kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak goreng tersebut?... (%)



Mayoritas cukup/sangat mendukung Kejaksaan Agung menuntaskan kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak goreng tersebut.

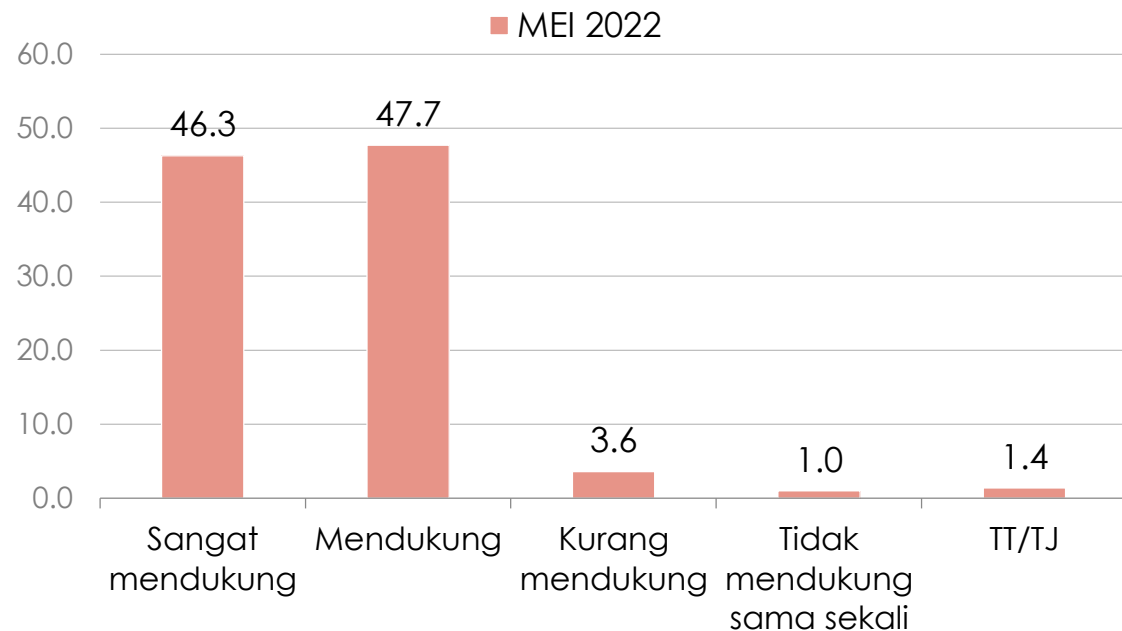
DUKUNGAN PRESIDEN PADA KEJAKSAAN AGUNG UNTUK MEMBONGKAR MAFIA MINYAK GORENG

Apakah Ibu/Bapak tahu atau pernah dengar Presiden Joko Widodo memberikan dukungan kepada Kejaksaan Agung untuk membongkar dan mengusut tuntas mafia minyak goreng?... (%)



Seberapa mendukung Ibu/Bapak terhadap sikap Presiden Joko Widodo yang memberi dukungan kepada Kejaksaan Agung untuk membongkar dan mengusut tuntas mafia minyak goreng tersebut?... (%)

(Base: Tahu Presiden Joko Widodo memberikan dukungan kepada Kejaksaan Agung untuk membongkar dan mengusut tuntas mafia minyak goreng)

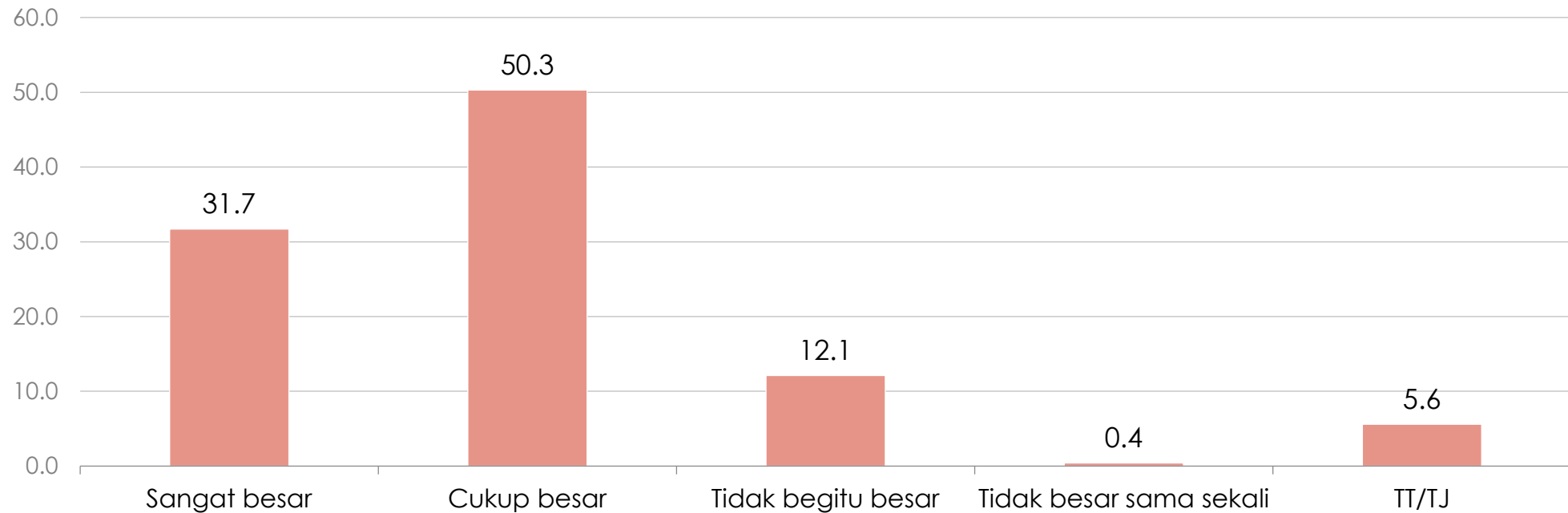


Sekitar 48% tahu atau pernah dengar Presiden Joko Widodo memberikan dukungan kepada Kejaksaan Agung untuk membongkar dan mengusut tuntas mafia minyak goreng, dan hampir semua mendukung sikap Presiden Joko Widodo tersebut.

KOMITMEN PRESIDEN JOKO WIDODO DALAM MENDUKUNG KEJAKSAAN AGUNG

Menurut Ibu/Bapak seberapa besar komitmen Presiden Joko Widodo dalam mendukung Kejaksaan Agung untuk membongkar dan mengusut tuntas mafia minyak goreng tersebut?... (%)

(Base: Tahu Presiden Joko Widodo memberikan dukungan kepada Kejaksaan Agung untuk membongkar dan mengusut tuntas mafia minyak goreng)



Mayoritas menilai komitmen Presiden Joko Widodo sangat/cukup besar dalam mendukung Kejaksaan Agung untuk membongkar dan mengusut tuntas mafia minyak goreng tersebut.

KEPUASAN ATAS KINERJA PRESIDEN MENURUT AWARENESS ISU DAN DUKUNGAN TERHADAP KEJAKSAAN AGUNG

	Base	Cukup/sangat puas	Kurang/tidak puas sama sekali	TI/TJ
Awareness Dirjen Perdagangan LN menjadi tersangka				
Ya, tahu	48,8	61,7	32,8	5,5
Tidak tahu	51,2	62,0	28,2	9,9
[Jika tahu] Percaya Dirjen Perdagangan LN terlibat				
Sangat+Cukup percaya	74,3	64,8	30,0	5,1
Kurang+Tidak percaya sama sekali	15,9	52,6	44,2	3,2
TI/TJ	9,8	52,8	34,9	12,3
[Jika tahu] Kejaksaan Agung menuntaskan kasus				
Sangat+Cukup yakin	68,9	68,9	27,2	3,9
Kurang+Tidak yakin sama sekali	24,5	46,0	50,7	3,4
TI/TJ	6,6	45,3	24,1	30,6
Dukungan terhadap Kejaksaan Agung dalam menuntaskan kasus				
Sangat mendukung+mendukung	80,2	64,4	31,6	4,0
Kurang+Tidak mendukung sama sekal	10,1	54,4	32,1	13,5
TI/TJ	9,7	48,4	18,6	33,0

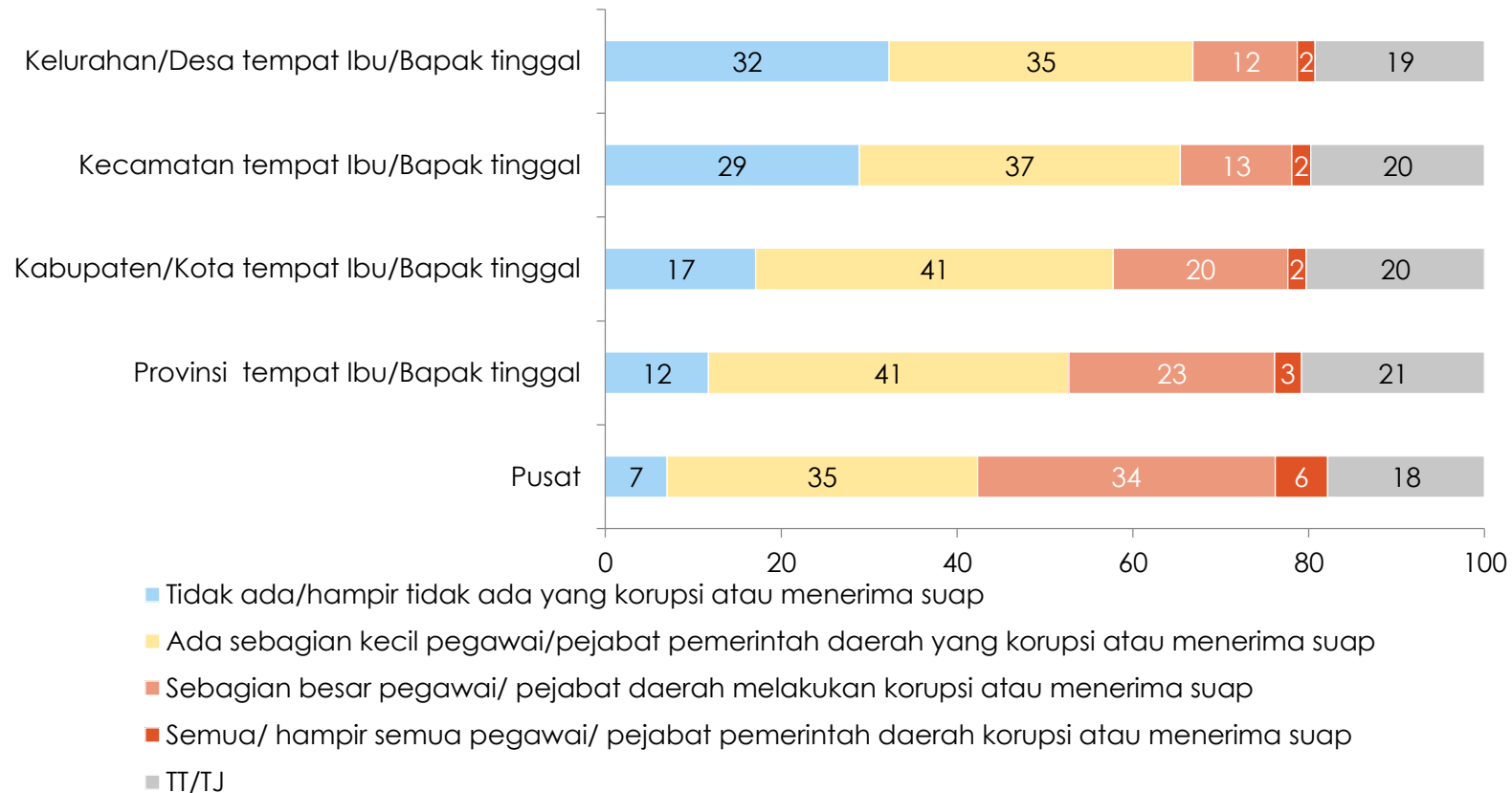
KEPUASAN ATAS KINERJA PRESIDEN MENURUT DUKUNGAN DAN KOMITMEN PRESIDEN TERHADAP KEJAKSAAN AGUNG

	Base	Cukup/sangat puas	Kurang/tidak puas sama sekali	TT/TJ
Awareness atas Presiden yang memberi dukungan kepada Kejaksaan Agung				
Ya, tahu	48.0	68.1	25.1	6.8
Tidak tahu	52.0	56.1	35.3	8.7
[Jika tahu] Dukungan atas sikap Presiden				
Sangat mendukung+mendukung	94.0	69.8	23.0	7.2
Kurang+Tidak mendukung sama sekc	4.6	46.5	53.5	0.0
TT/TJ	1.4	23.4	76.6	0.0
[Jika tahu] Komitmen Presiden dalam mendukung Kejaksaan Agung				
Sangat+Cukup besar	82.0	72.3	22.3	5.4
Sedikit+Sangat sedikit	12.4	48.6	44.1	7.3
TT/TJ	5.6	49.2	25.3	25.6

KORUPSI DI TINGKAT MASSA

PENYEBARAN KORUPSI DI PEMERINTAHAN

Menurut Ibu/Bapak seberapa luas praktik korupsi dan suap menyebar di pemerintahan? Apakah “Tidak ada/hampir tidak ada yang korupsi atau menerima suap”, “Ada sebagian kecil pegawai/pejabat pemerintah ... yang korupsi atau menerima suap”, “Ada sebagian besar pegawai/pejabat pemerintah ... melakukan korupsi atau menerima suap”, atau “Semua/hampir semua pegawai/pejabat pemerintah ... korupsi atau menerima suap”? (%)



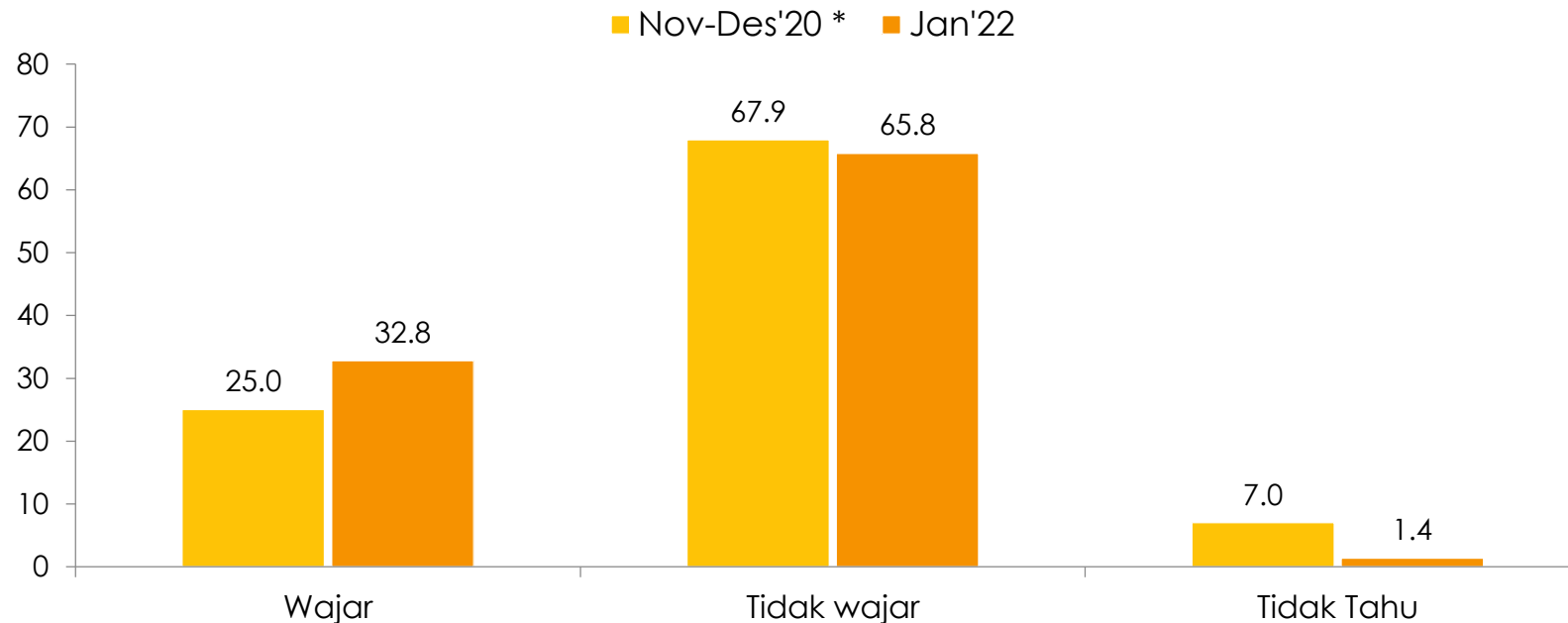
Semakin tinggi tingkat pemerintahan semakin luas praktik korupsi dan suap menyebar.

*Sumber: LSI Nov-Des 2020



SIKAP TERHADAP PEMBERIAN HADIAH DALAM MEMPERLANCAR SUATU PROSES/UCAPAN TERIMA KASIH PADA INSTANSI PEMERINTAH

Menurut pendapat Ibu/Bapak, apakah merupakan hal yang wajar atau tidak wajar bagi masyarakat Indonesia memberikan sesuatu seperti: uang, barang, hiburan, hadiah di luar persyaratan/ketentuan untuk memperlancar suatu proses atau sebagai bentuk terima kasih ketika berhubungan dengan instansi pemerintah? (%)



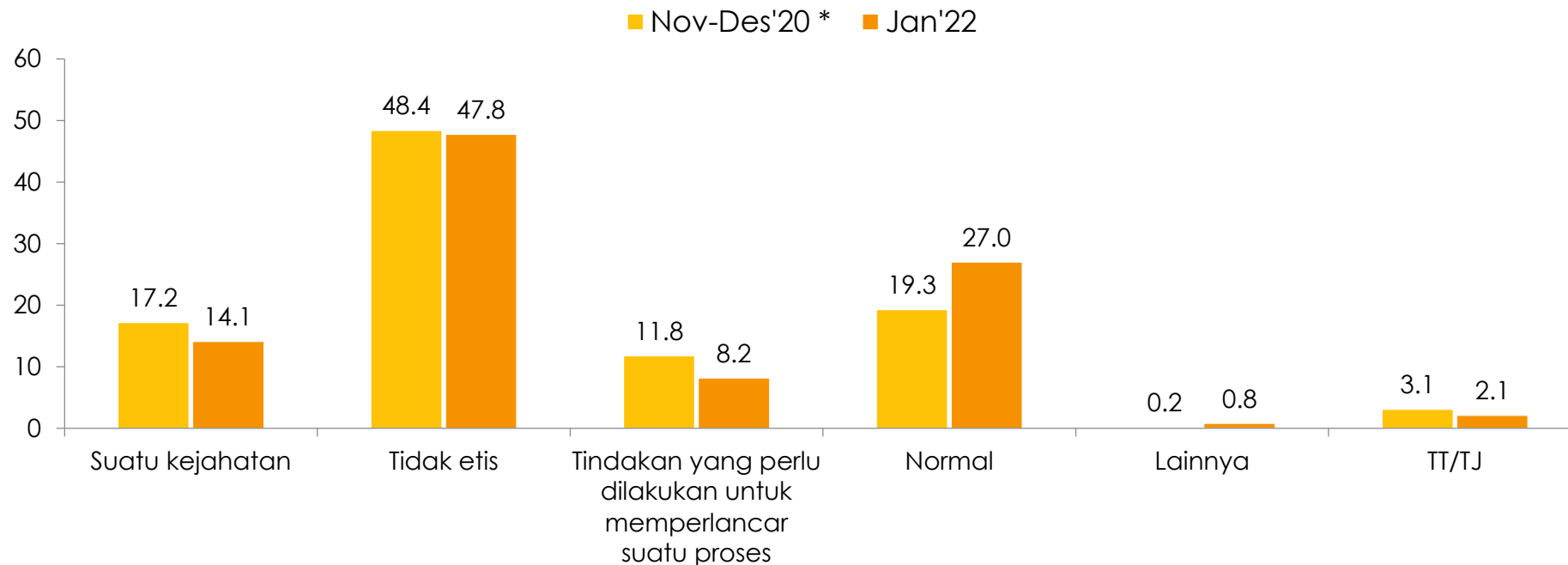
Sikap wajar terhadap suatu pemberian untuk memperlancar suatu urusan atau bentuk terima kasih Ketika berhubungan dengan instansi pemerintah cenderung meningkat.

*Sumber: LSI Nov-Des 2020



PENGGUNAAN HUBUNGAN PRIBADI UNTUK MEMPERLANCAR PROSES PENGURUSAN KEPENTINGAN

Apakah pendapat Ibu/Bapak mengenai penggunaan hubungan pribadi untuk mempercepat proses pengurusan suatu kepentingan? Itu adalah ... (%)



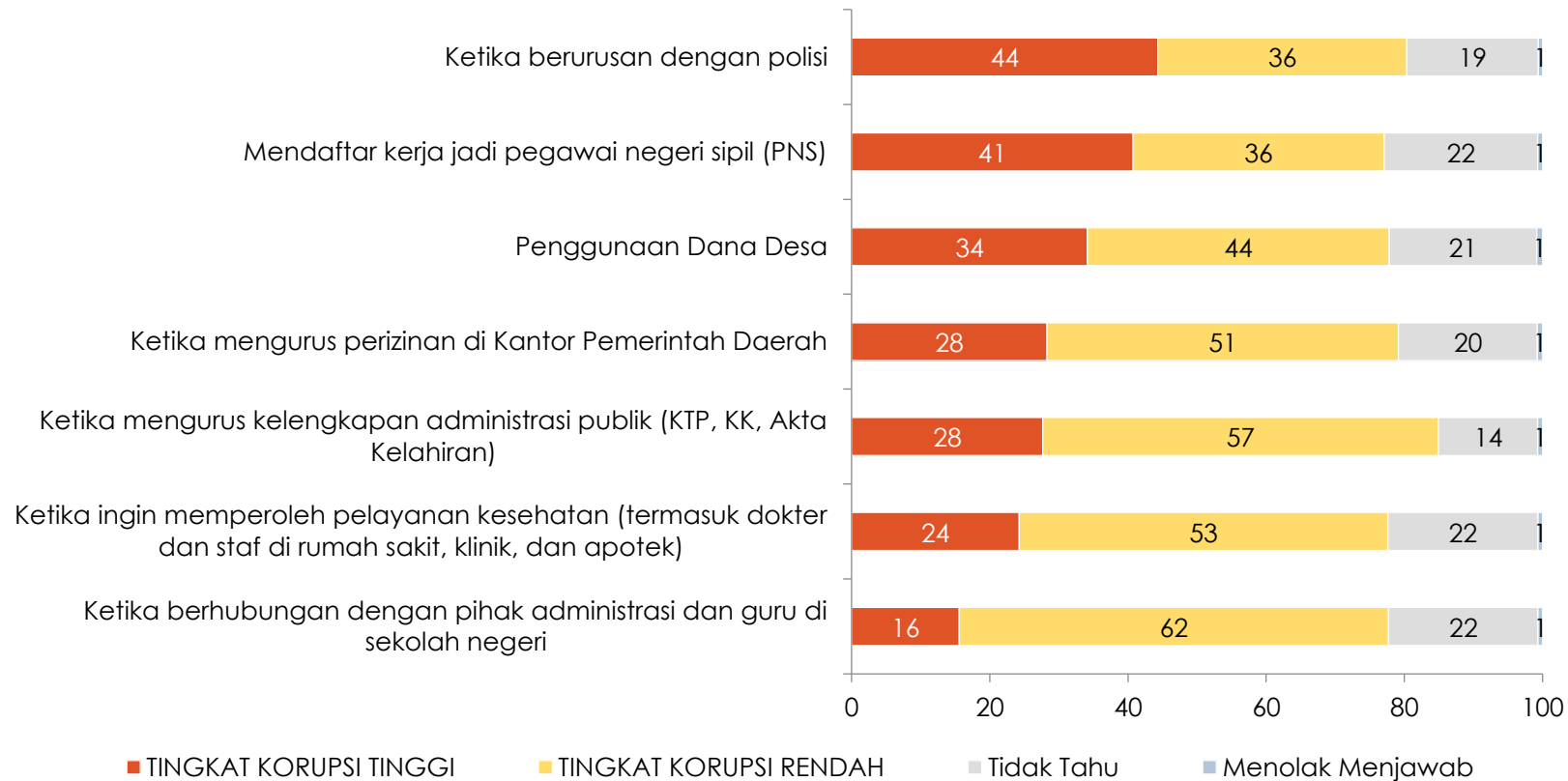
Kebanyakan warga, sekitar 47-48% menyatakan bahwa tidak etis menggunakan hubungan pribadi untuk mempercepat pengurusan suatu kepentingan, tapi yang menilai hal tersebut sebagai hal yang normal cenderung meningkat.

*Sumber: LSI Nov-Des 2020



PENYEBARAN KORUPSI DI BEBERAPA SEKTOR

Menurut pendapat Ibu/Bapak, seberapa tinggi penyebaran korupsi di bidang di bawah ini? (%)



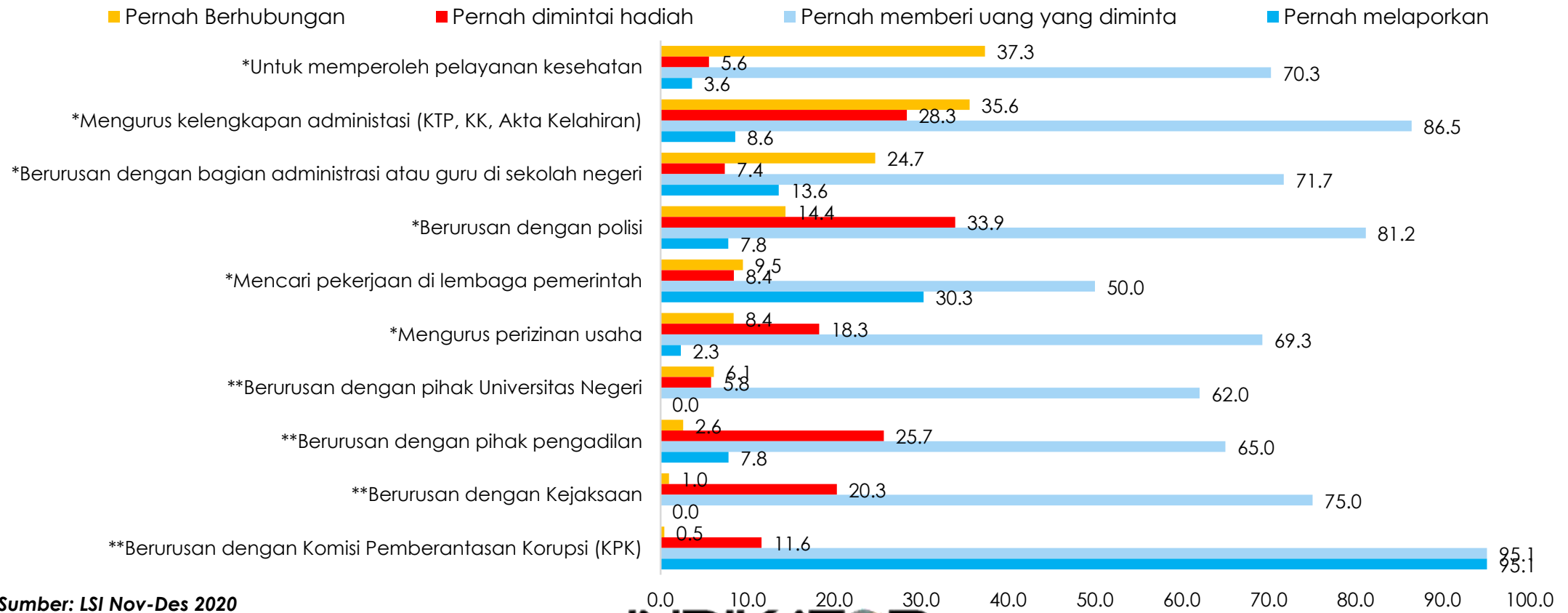
Tingkat penyebaran korupsi lebih banyak dinilai tinggi ketimbang rendah ketika berurusan dengan polisi, dan mendaftar jadi PNS.

*Sumber: LSI Nov-Des 2020



BERHUBUNGAN LANGSUNG DENGAN PEGAWAI PEMERINTAH DALAM SATU BULAN TERAKHIR

- Dalam 1 tahun terakhir, pernahkah Ibu/Bapak atau keluarga Ibu/Bapak berhubungan dengan pegawai pemerintah dalam hal di bawah ini? (%)
- **JIKA PERNAH** berhubungan dengan pegawai pemerintah, Apakah Ibu/Bapak atau keluarga Ibu/Bapak pernah diminta memberikan hadiah/uang untuk mendapatkan pelayanan yang Ibu/Bapak butuhkan di luar biaya resmi? (%)
- **Jika pernah diminta memberikan hadiah/uang**, apakah Ibu/Bapak memberi hadiah/uang seperti yang diminta tersebut? (%)
- **Jika pernah diminta memberikan hadiah/uang**, apakah Ibu/Bapak pernah melaporkan bahwa Ibu/Bapak telah diminta memberikan hadiah/uang untuk mendapatkan pelayanan yang Ibu/Bapak butuhkan di luar biaya resmi? (%)



* Sumber: LSI Nov-Des 2020

** Sumber: MSI-Cegah Okt 2018



ALASAN UTAMA MEMBERI HADIAH/UANG

[Khusus responden yang menjawab “pernah memberi” hadiah/uang ketika diminta]. Tadi Ibu/Bapak menjawab bahwa Ibu/Bapak pernah memberi hadiah/uang ketika diminta untuk mendapatkan pelayanan yang Ibu/Bapak butuhkan di luar biaya resmi. Apa alasan utama Ibu/Bapak ketika memberi hadiah/uang tersebut?... (%)



Supaya urusan cepat selesai merupakan alasan utama memberi hadiah/uang.

*Sumber: LSI Nov-Des 2020



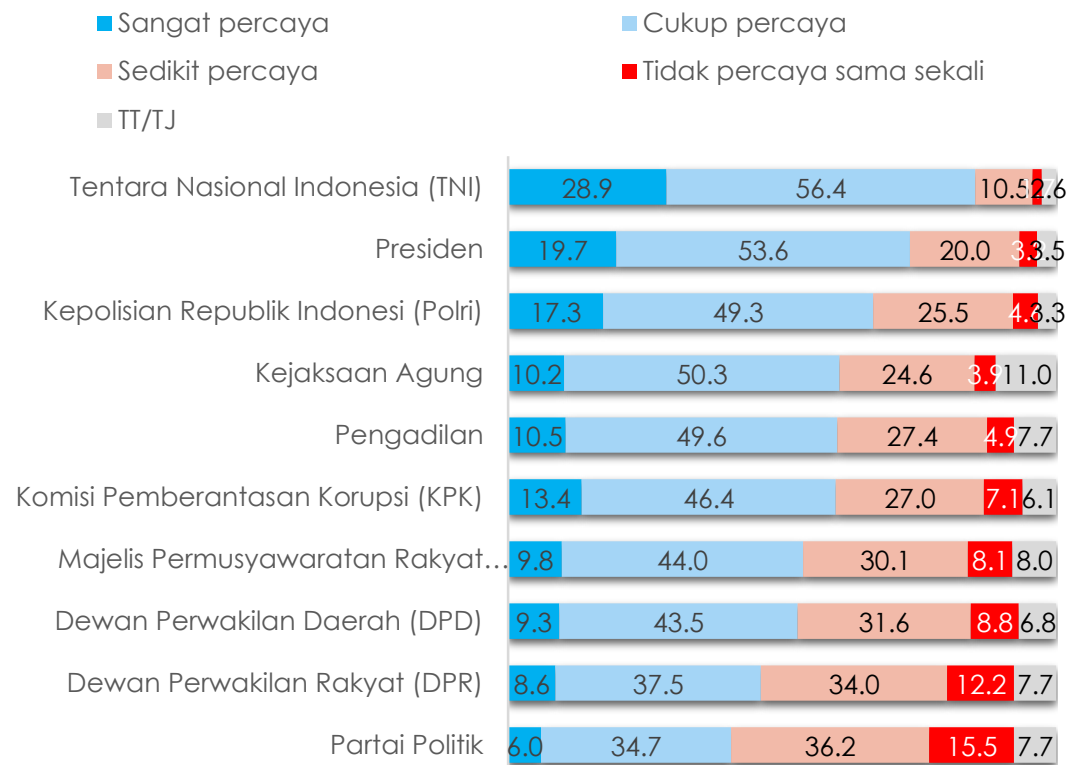
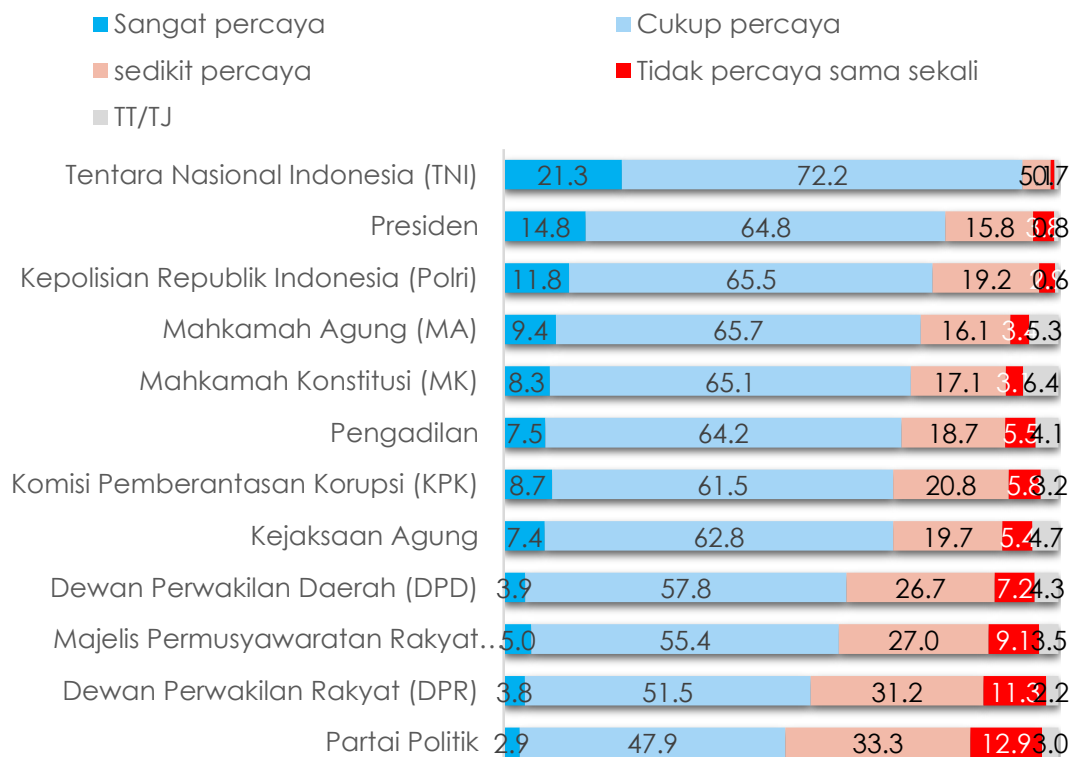
KEPERCAYAAN TERHADAP LEMBAGA

KEPERCAYAAN TERHADAP LEMBAGA

Kami akan menyebutkan beberapa nama lembaga. Tolong sebutkan tingkat kepercayaan Ibu/Bapak terhadap masing-masing lembaga tersebut? Apakah Ibu/Bapak sangat percaya (SA-P), cukup percaya (C-P), sedikit percaya (SI-P), atau tidak percaya sama sekali (TPSS)? ... (%)

14 – 20 April 2022

18-24 Mei 2022



KEPERCAYAAN TERHADAP LEMBAGA PENEGAK HUKUM MENURUT DEMOGRAFI DAN BASIS PEMILU 2019

	Base	KEPOLISIAN			KPK			KEJAGUNG			PENGADILAN		
		Percaya	Kurang percaya	TT/TJ	Percaya	Kurang percaya	TT/TJ	Percaya	Kurang percaya	TT/TJ	Percaya	Kurang percaya	TT/TJ
GENDER													
Laki-laki	50.1	66.7	30.5	2.8	62.3	32.1	5.6	62.1	26.1	11.7	63.4	30.2	6.4
Perempuan	49.9	66.6	29.7	3.7	57.4	36.0	6.6	58.8	30.9	10.4	56.8	34.3	9.0
USIA													
<= 21 tahun	12.0	68.7	31.3	0.0	53.4	45.3	1.3	60.2	37.0	2.8	60.7	37.1	2.2
22 - 25 tahun	10.9	69.6	29.7	0.7	54.7	39.7	5.6	66.8	26.2	7.0	63.8	32.1	4.1
26 - 40 tahun	37.3	70.9	27.2	1.9	61.5	36.6	1.9	63.5	30.3	6.2	61.8	33.2	5.0
41 - 55 tahun	25.2	59.9	37.5	2.6	56.6	35.0	8.3	53.9	34.2	11.9	54.1	39.0	6.9
> 55 tahun	14.6	63.6	23.9	12.5	70.3	12.3	17.4	59.4	8.7	31.9	63.1	14.1	22.9
ETNIS													
Jawa	41.1	65.0	31.7	3.3	58.7	31.5	9.8	57.1	27.5	15.4	57.5	32.4	10.1
Sunda	15.6	77.7	17.6	4.7	60.7	33.3	6.0	65.5	26.1	8.4	60.1	31.3	8.6
Batak	3.6	54.5	45.5	0.0	59.8	38.2	2.0	61.6	33.8	4.6	47.0	45.3	7.6
Madura	3.2	72.1	27.9	0.0	57.4	39.3	3.3	60.1	36.6	3.3	61.6	35.1	3.3
Betawi	2.9	74.4	25.6	0.0	70.8	29.2	0.0	74.2	22.9	2.8	73.2	20.6	6.2
Minang	2.6	35.7	62.1	2.2	40.6	57.2	2.2	47.3	50.5	2.2	24.7	73.1	2.2
Bugis	2.6	76.8	23.2	0.0	65.0	32.1	2.9	64.1	31.3	4.5	49.5	43.0	7.5
Melayu	2.2	58.8	40.0	1.2	42.6	45.4	12.0	47.7	40.6	11.7	56.3	31.3	12.4
Lainnya	26.1	65.7	30.1	4.2	63.1	34.6	2.2	63.1	26.9	10.0	69.3	26.6	4.1
AGAMA													
Islam	87.0	65.8	30.6	3.6	59.9	34.2	5.8	59.2	30.0	10.8	58.8	34.1	7.2
Protestan/Katolik	9.9	73.4	26.0	0.6	60.6	31.8	7.6	71.1	20.0	8.9	68.9	22.2	8.9
Lainnya	3.1	70.5	28.1	1.3	55.4	35.6	9.0	61.7	12.8	25.5	69.8	12.6	17.7

Etnis Minang rendah tingkat kepercayaannya terhadap Kepolisian, KPK, Kejagung dan Pengadilan. Etnis Melayu rendah kepercayaannya terhadap KPK dan Kejagung, dan etnis Bugis rendah terhadap Pengadilan.

KEPERCAYAAN TERHADAP LEMBAGA PENEGAK HUKUM MENURUT DEMOGRAFI DAN BASIS PEMILU 2019

	Base	KEPOLISIAN			KPK			KEJAGUNG			PENGADILAN		
		Percaya	Kurang percaya	TT/TJ	Percaya	Kurang percaya	TT/TJ	Percaya	Kurang percaya	TT/TJ	Percaya	Kurang percaya	TT/TJ
PENDIDIKAN													
<= SD	36.7	69.7	23.2	7.0	62.4	28.3	9.3	62.8	20.0	17.2	64.4	25.1	10.4
SLTP	18.6	65.4	32.5	2.1	58.9	37.4	3.7	52.3	38.9	8.8	52.4	39.0	8.6
SLTA	30.4	68.1	31.0	0.8	59.4	37.3	3.3	64.2	30.5	5.4	63.0	32.6	4.4
Kuliah	13.6	57.3	42.7	0.0	56.8	37.8	5.3	56.9	34.3	8.8	51.1	42.8	6.1
TT.TJ	0.7	56.5	37.5	6.1	30.7	28.2	41.1	58.9	0.0	41.1	88.1	0.0	11.9
PEKERJAAN													
Petani/peternak/nelayan	18.7	66.3	26.3	7.4	55.1	36.5	8.4	51.4	30.9	17.8	57.1	33.6	9.3
Buruh kasar, sopir/ojek, keamanan, warung/PKL, tidak tetap, menganggur	25.7	67.3	27.8	4.9	59.1	32.7	8.2	64.6	22.8	12.6	61.0	28.7	10.3
Wiraswasta, pengusaha	9.1	63.7	36.3	0.0	62.3	35.3	2.4	66.3	31.6	2.1	60.2	38.2	1.6
Pegawai (negeri/swasta), Guru/Dosen, Profesional	13.5	59.6	40.1	0.3	54.6	39.4	5.9	58.4	32.7	8.9	57.9	35.8	6.3
Ibu Rumah Tangga	23.1	68.3	29.3	2.3	64.4	31.1	4.5	62.4	29.9	7.7	63.6	30.5	5.9
Masih sekolah/kuliah	4.9	69.8	30.2	0.0	61.3	36.2	2.4	61.3	38.7	0.0	62.0	38.0	0.0
Lainnya	5.0	77.0	23.0	0.0	72.3	27.7	0.0	62.1	15.1	22.7	57.7	24.2	18.2
PENDAPATAN													
< 1 juta	16.0	71.0	29.0	0.0	50.2	44.1	5.7	64.5	25.7	9.8	60.9	31.5	7.6
1 - < 2 juta	30.4	72.2	26.9	1.0	68.4	27.1	4.5	66.3	25.2	8.5	62.2	32.9	4.9
2 - < 4 juta	31.8	63.7	31.1	5.2	61.9	31.5	6.6	63.1	25.9	11.0	62.8	28.2	8.9
=> 4 juta	21.8	58.6	41.4	0.0	55.8	43.5	0.7	58.2	36.3	5.5	53.6	41.2	5.1

KEPERCAYAAN TERHADAP LEMBAGA PENEGAK HUKUM MENURUT DEMOGRAFI DAN BASIS PEMILU 2019

	Base	KEPOLISIAN			KPK			KEJAGUNG			PENGADILAN		
		Percaya	Kurang percaya	TT/TJ	Percaya	Kurang percaya	TT/TJ	Percaya	Kurang percaya	TT/TJ	Percaya	Kurang percaya	TT/TJ
DESA/KOTA													
Pedesaan	49.9	68.4	27.1	4.5	61.3	30.6	8.1	59.8	27.6	12.6	58.8	32.1	9.0
Perkotaan	50.1	64.9	33.0	2.1	58.4	37.4	4.2	61.1	29.4	9.5	61.4	32.3	6.3
WILAYAH													
SUMATERA	20.4	57.3	35.7	7.1	56.9	38.0	5.1	58.6	26.7	14.7	59.4	30.9	9.7
BANTEN	4.3	64.2	35.8	0.0	49.7	48.9	1.4	65.4	23.3	11.3	67.4	30.6	2.1
DKI	4.1	64.9	35.1	0.0	76.8	22.3	0.9	64.4	33.6	2.0	61.6	31.3	7.1
JABAR	17.4	78.4	20.7	0.9	60.3	35.4	4.3	58.1	29.0	12.9	53.3	36.5	10.2
JATENG DIY	16.1	61.5	34.5	4.0	60.7	31.9	7.5	59.2	30.9	9.9	65.0	31.4	3.6
JATIM	16.2	73.3	24.0	2.7	59.1	33.3	7.7	58.6	30.7	10.7	58.8	36.1	5.1
BALI NUSA	5.3	66.0	32.9	1.1	67.2	31.3	1.5	71.1	19.7	9.2	65.6	31.0	3.4
KALIMANTAN	5.9	63.8	27.1	9.1	64.4	21.1	14.5	73.5	22.4	4.2	66.4	21.2	12.4
SULAWESI	7.0	67.8	32.2	0.0	59.1	38.3	2.7	59.4	36.3	4.3	55.6	39.2	5.2
MALUKU PAPUA	3.3	64.0	36.0	0.0	49.1	30.9	20.0	50.5	23.3	26.3	61.1	12.7	26.3

Warga Banten dan Maluku Papua rendah tingkat kepercayaannya terhadap KPK.

KEPERCAYAAN TERHADAP LEMBAGA PENEGAK HUKUM MENURUT DEMOGRAFI DAN BASIS PEMILU 2019

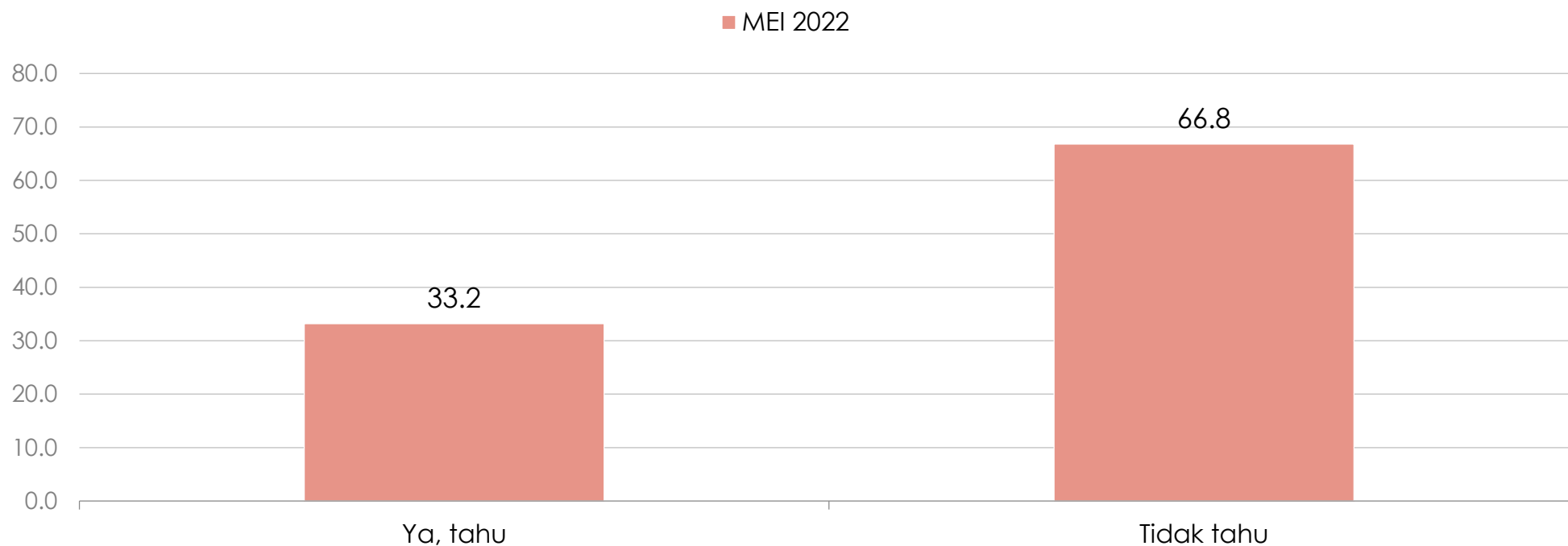
	Base	KEPOLISIAN			KPK			KEJAGUNG			PENGADILAN		
		Percaya	Kurang percaya	TT/TJ	Percaya	Kurang percaya	TT/TJ	Percaya	Kurang percaya	TT/TJ	Percaya	Kurang percaya	TT/TJ
BASIS PILEG 2019													
PDIP	19.3	76.3	21.6	2.1	66.4	28.2	5.4	66.4	26.1	7.5	66.0	28.2	5.8
GERINDRA	12.6	62.0	36.7	1.3	59.4	38.0	2.6	61.6	34.5	3.9	57.6	38.4	3.9
GOLKAR	12.3	59.6	38.6	1.8	59.6	38.6	1.8	64.9	31.6	3.5	61.4	35.1	3.5
PKB	9.7	78.7	21.3	0.0	63.8	34.0	2.1	72.3	23.4	4.3	72.3	25.5	2.1
NASDEM	9.0	63.3	36.7	0.0	57.1	42.9	0.0	65.3	34.7	0.0	67.3	32.7	0.0
PKS	8.2	50.0	50.0	0.0	45.2	51.6	3.2	46.8	50.0	3.2	46.8	51.6	1.6
DEMOKRAT	7.8	42.7	57.3	0.0	50.7	46.7	2.7	64.0	32.0	4.0	50.7	46.7	2.7
PAN	6.8	66.7	33.3	0.0	66.7	33.3	0.0	58.3	33.3	8.3	66.7	33.3	0.0
PPP	4.5	50.0	50.0	0.0	50.0	50.0	0.0	80.0	20.0	0.0	60.0	40.0	0.0
LAINNYA	9.7	66.7	33.3	0.0	50.0	46.7	3.3	60.0	40.0	0.0	63.3	36.7	0.0
BASIS PILPRES 2019													
Jokowi - Ma'ruf Amin	55.5	72.8	25.3	1.9	63.1	33.3	3.5	66.7	26.6	6.7	66.3	28.9	4.8
Prabowo - Sandi	44.5	57.6	41.8	0.7	52.4	44.5	3.2	57.1	39.5	3.4	51.7	44.9	3.4

Basis PKS pada pemilu 2019 yang lalu rendah kepercayaannya kepada KPK, Kejagung dan Pengadilan. Dan basis Demokrat rendah terhadap Kepolisian.

KTT-G20

AWARENESS BAHWA INDONESIA MERUPAKAN PRESIDENSI G20

Apakah Ibu/Bapak tahu/pekerja pernah dengar bahwa tahun 2022 ini Indonesia merupakan Presidensi G20, yaitu tuan rumah atau penyelenggara pertemuan tingkat tinggi negara-negara yang tergabung dalam kelompok 20 negara ekonomi utama dunia (KTT G20), pada November 2022 mendatang?... (%)

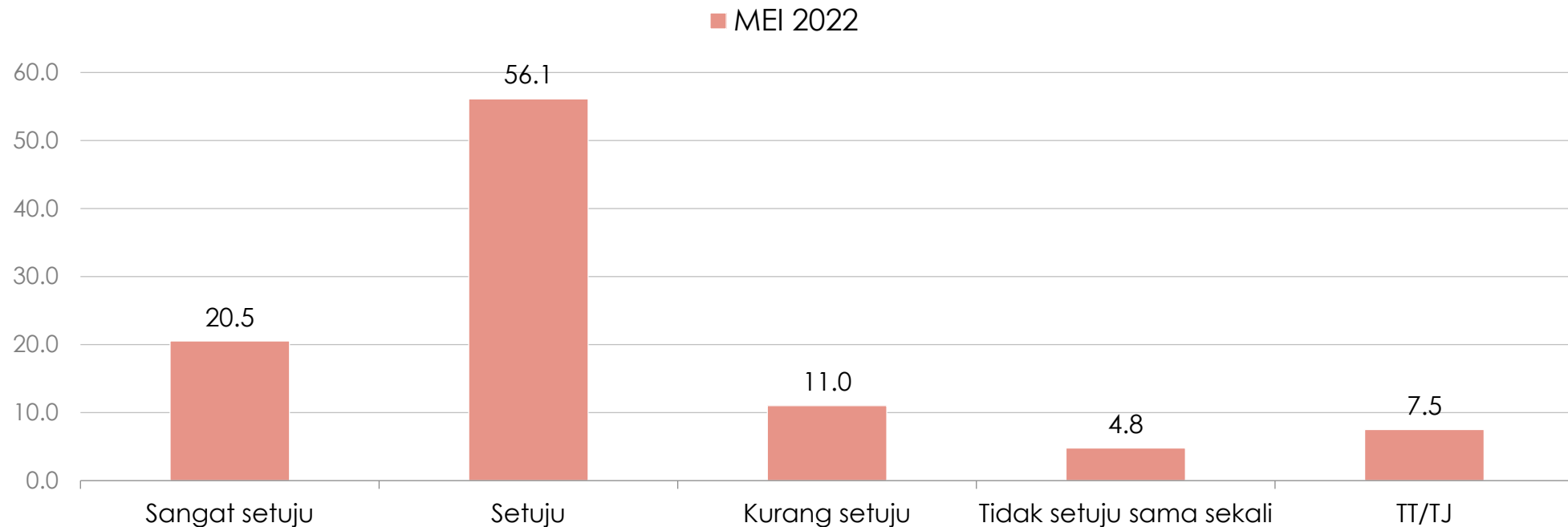


Sekitar 33.2% tahu bahwa tahun 2022 ini Indonesia merupakan Presidensi G20.

INDONESIA TETAP MENGUNDANG RUSIA DALAM KTT G20

Rusia juga merupakan salah satu negara yang tergabung dalam kelompok G20, dan dalam situasi konflik/perang antara Rusia dan Ukraina hingga saat ini, sejumlah negara anggota G20 menentang keikutsertaan Rusia dalam KTT G20 tersebut (seperti Amerika, Australia, Kanada, Inggris, dan Uni Eropa). Apakah Ibu/Bapak setuju jika Indonesia tetap mengundang Rusia dalam KTT G20 November 2022 mendatang?... (%)

(Base: Tahu bahwa tahun 2022 ini Indonesia merupakan Presidensi G20)

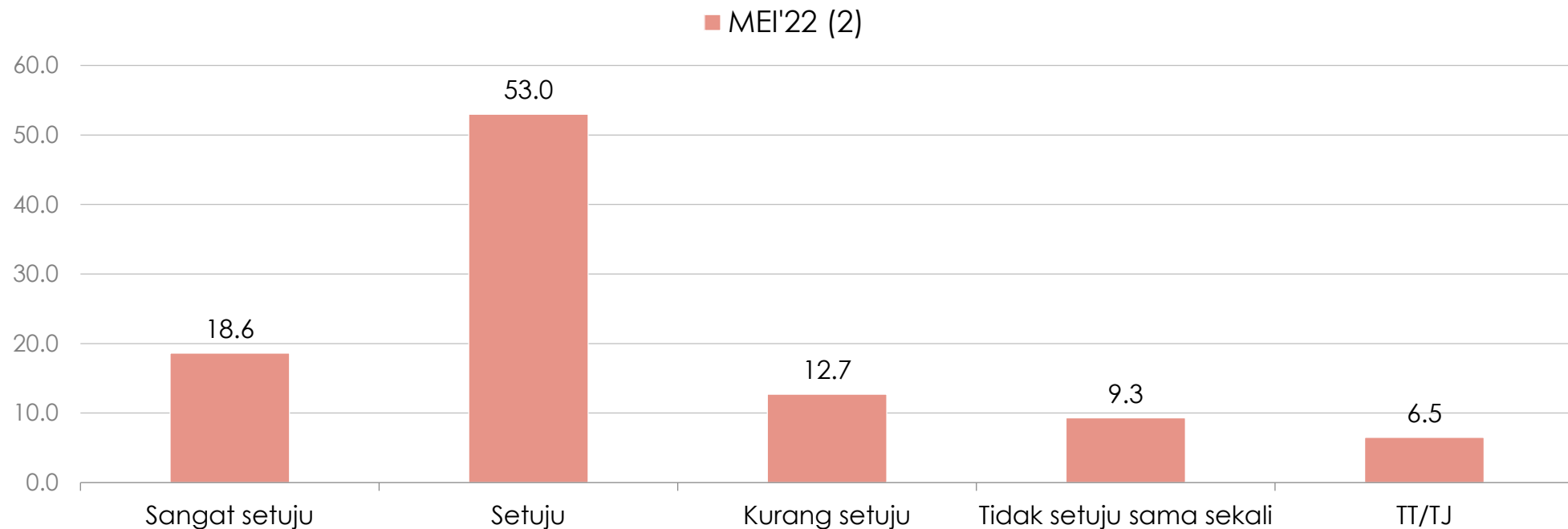


Lebih banyak yang setuju jika Indonesia tetap mengundang Rusia dalam KTT G20 November 2022 mendatang.

SIKAP TERHADAP INDONESIA YANG TETAP MENGUNDANG RUSIA DALAM KTT G20

Apakah Ibu/Bapak setuju jika Indonesia dalam KTT G20 mendatang tetap mengundang Rusia sekaligus juga mengundang Ukraina?... (%)

(Base: Tahu bahwa tahun 2022 ini Indonesia merupakan Presidensi G20)

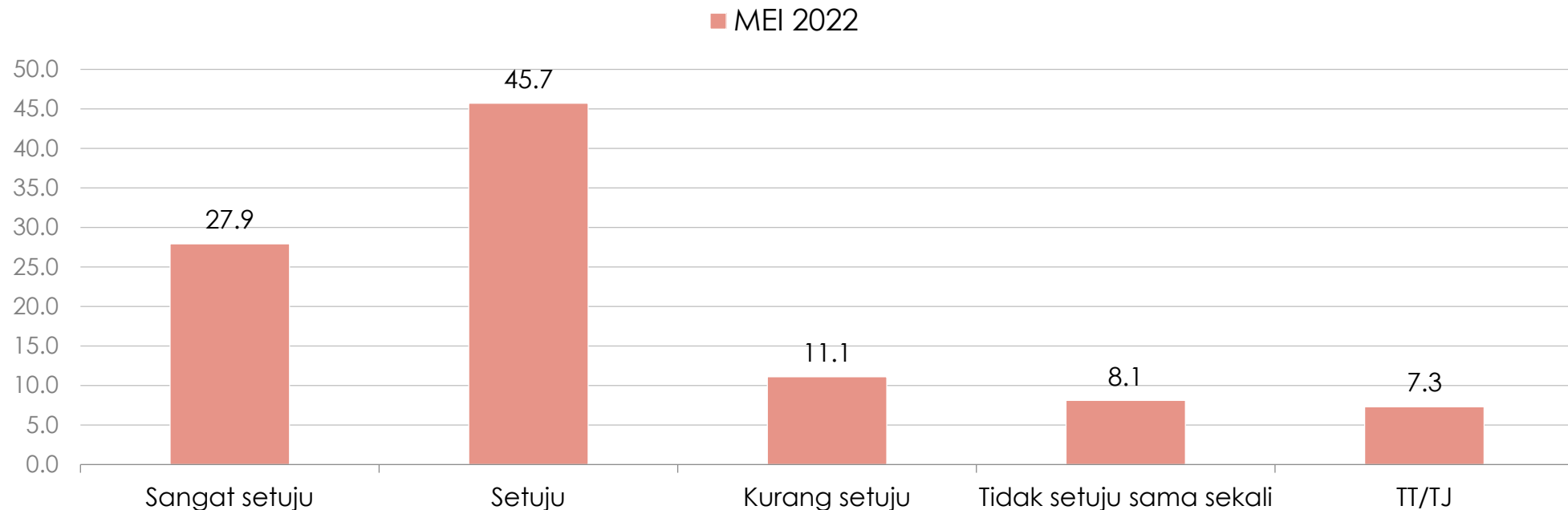


Lebih banyak yang setuju jika Indonesia dalam KTT G20 mendatang tetap mengundang Rusia sekaligus juga mengundang Ukraina.

SIKAP INDONESIA TERKAIT PERANG RUSIA DAN UKRAINA

Pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Luar Negeri secara tegas menyatakan sikap bahwa Indonesia memandang Rusia dan Ukraina sebagai sahabat dekat, ingin membangun persahabatan yang lebih kuat dengan kedua negara, dan konstitusi (UUD) Indonesia memandatkan agar Indonesia turut menjaga perdamaian dunia. Seberapa setuju Ibu/Bapak dengan sikap Indonesia terkait perang Rusia dan Ukraina tersebut?... (%)

(Base: Tahu bahwa tahun 2022 ini Indonesia merupakan Presidensi G20)

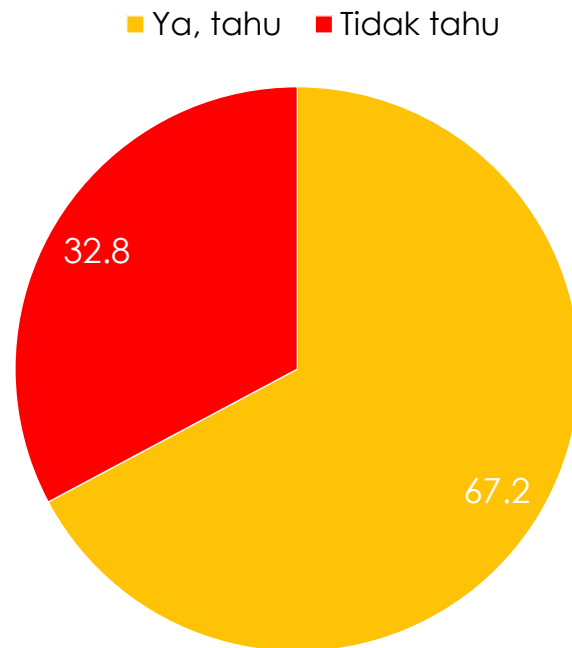


Lebih banyak yang setuju dengan sikap Indonesia terkait perang Rusia dan Ukraina tersebut.

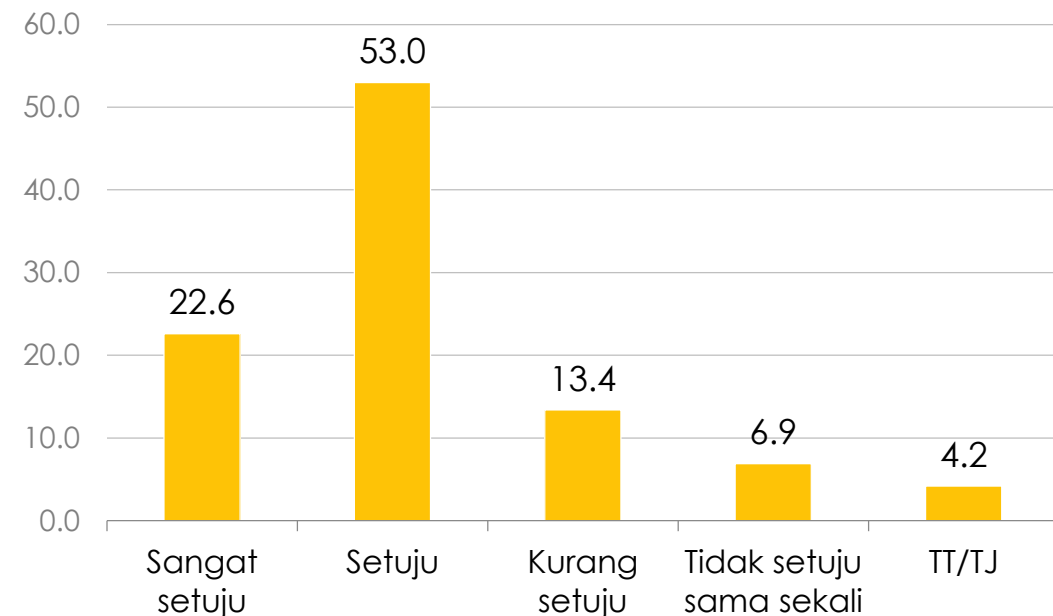
PELONGGARAN PROTOKOL KESEHATAN

MASYARAKAT YANG BERAKTIVITAS DI LUAR RUANGAN DIPERBOLEHKAN TIDAK MEMAKAI MASKER

Apakah Ibu/Bapak tahu/pernah dengar baru saja Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan diperbolehkan tidak memakai masker?... (%)



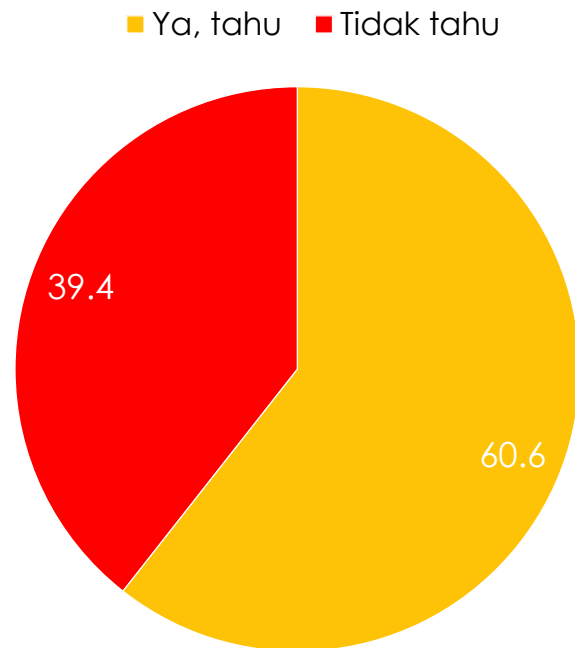
Seberapa setuju Ibu/Bapak masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan diperbolehkan tidak memakai masker?... (%)



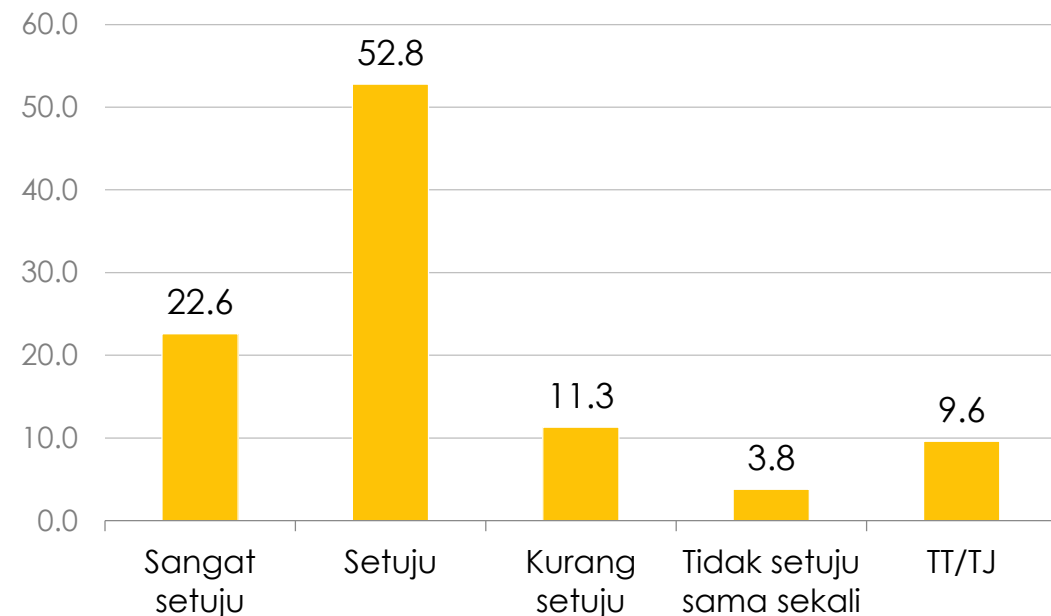
Mayoritas tahu atau pernah dengar kebijakan tersebut dan mayoritas setuju/sangat setuju dengan kebijakan tersebut.

PERJALANAN DALAM DAN LUAR NEGERI TIDAK PERLU PCR/ANTIGEN JIKA SUDAH DIVAKSIN LENGKAP

Selain itu pemerintah juga melonggarkan ketentuan perjalanan dalam dan luar negeri yang sudah mendapat vaksin lengkap tidak perlu melakukan pemeriksaan PCR atau Antigen. Apakah Ibu/Bapak tahu/pernah dengar?... (%)



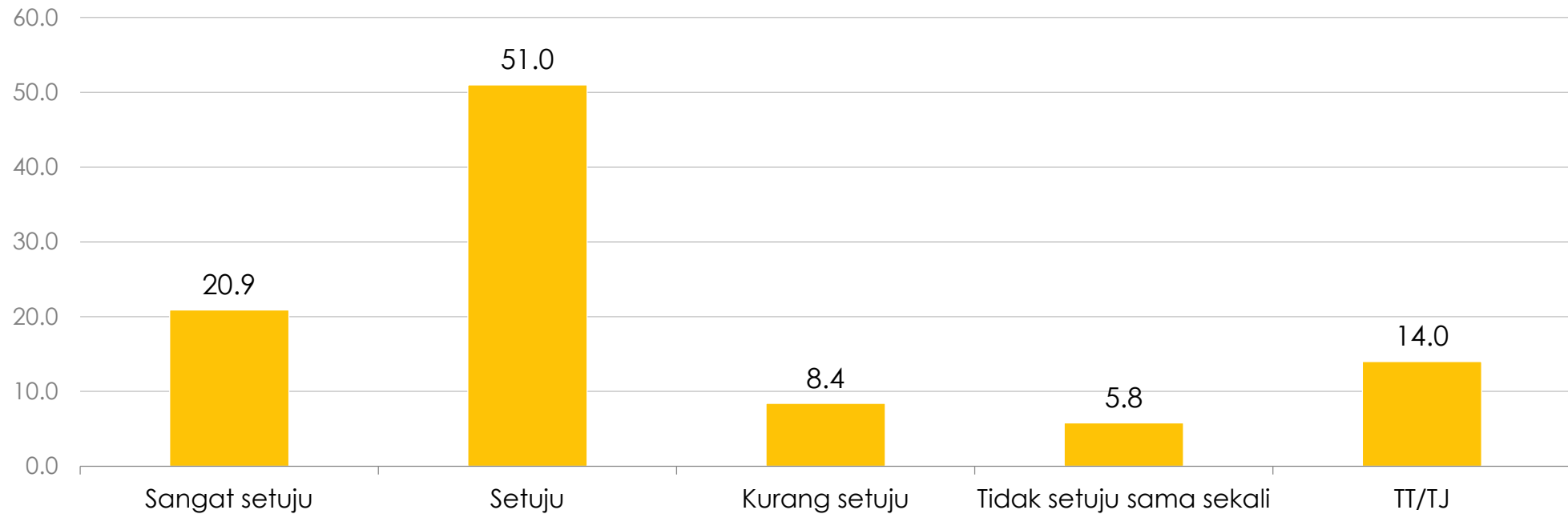
Seberapa setuju Ibu/Bapak masyarakat yang sudah mendapat vaksin lengkap tidak perlu dilakukan pemeriksaan PCR atau Antigen ketika melakukan perjalanan dalam dan luar negeri?... (%)



Mayoritas tahu atau pernah dengar kebijakan tersebut dan mayoritas setuju/sangat setuju dengan kebijakan tersebut.

STATUS PANDEMI DITURUNKAN MENJADI ENDEMI

Seberapa setuju Ibu/Bapak status Pandemi Covid-19 diturunkan menjadi endemi?... (%)



Mayoritas menilai setuju status Pandemi Covid-19 diturunkan menjadi endemic.

KESIMPULAN

KESIMPULAN

- Setelah gelombang Pandemi Covid-19 mereda dan perekonomian nasional yang dinilai buruk terus menurun hingga akhir tahun 2021, isu kelangkaan minyak goreng di masyarakat kemudian muncul.
- Isu ini juga sangat masif di masyarakat. Sekitar minggu ke tiga awal di bulan April, lebih dari 80% warga nasional mengalami kelangkaan minyak goreng, dan kemungkinan besar lebih masif lagi di beberapa waktu sebelumnya karena kelangkaan juga sudah terjadi.
- Isu ini sangat potensial menghambat perbaikan atas kondisi ekonomi nasional pasca pandemi karena sifatnya yang juga sangat masif terhadap warga nasional. Kemudian ditengarai terjadi tindak pidana korupsi di balik kelangkaan yang terjadi, sehingga isu ini memiliki dampak yang meluas kepada dimensi lainnya, terutama penegakan hukum, pemberantasan korupsi dan stabilitas politik.
- Dalam satu bulan (April ke Mei, 2022), tampak terjadi penurunan yang sangat besar terkait kesulitan warga dalam mengakses minyak goreng, dan saat ini terutama masalah harga yang masih kurang terjangkau dirasa warga.

KESIMPULAN

- Namun demikian, satu dimensi perbaikan yang terjadi tampak belum diikuti oleh dimensi yang lain.
- Sejak isu kelangkaan dan dugaan adanya mafia minyak goreng merebak, secara bersamaan persepsi atas penegakan hukum dan tingkat kepercayaan terhadap lembaga-lembaga penegak hukum juga mengalami penurunan, termasuk tingkat kepercayaan terhadap Presiden sebagai pemimpin tertinggi penegakan hukum.
- Ini sinyal yang sangat jelas, bahwa meski persoalan kepentingan warga telah menunjukkan perbaikan yang cukup besar, tapi tingkat kepercayaan publik terhadap institusi elit masih menyisakan persoalan.
- Ini bisa dipahami, karena dengan mulai diungkapnya sebagian kasus ini publik kemudian menilai bahwa sumber persoalan berada di lingkungan penguasa, pengambil kebijakan, maka lumrah kepercayaan publik belum terjadi pemulihan.
- Oleh karena itu, pihak pengambil kebijakan harus memberi garansi kepada publik untuk menuntaskan kasus ini, dan sedapat mungkin mencegah terjadinya pengalaman serupa.

KESIMPULAN

- Harapan tinggi dari warga terhadap institusi yang menangani kasus ini dan juga terhadap komitmen Presiden dalam mendukung penuntasannya, harus bisa direalisasikan, sedekat mungkin dengan harapan publik.
- Tapi ini hanya satu kasus, sementara agenda pemberantasan korupsi bukan tema baru dalam ekosistem demokrasi, namun korupsi selalu terjadi di tubuh pemerintah sendiri (contoh kasus terdahulu yaitu kasus Bank Century, Djoko Tjandra, dan lain-lain). Sehingga lumrah mayoritas warga nasional menilai tingkat korupsi di Indonesia tidak berubah (31.2%) dan bahkan sebagian besar warga menilai semakin meningkat (42.8%) dalam dua tahun terakhir.
- Sempat menurun dan landai pada periode Agustus – November 2020, kemudian meningkat hingga Juli 2021 dan awal 2022 kembali menurun. Tapi persepsi terhadap tingkat korupsi yang meningkat selalu paling tinggi ketimbang menurun atau tidak berubah sejak 2016.
- Dan terutama di lingkungan pemerintah pusat. Pada temuan di akhir tahun 2020 sekitar 40% warga nasional menilai bahwa sebagian besar atau hampir semua pegawai/pejabat pemerintah pusat korupsi/menerima suap.

KESIMPULAN

- Oleh karena itu, setiap rezim akan selalu menghadapi tantangan besar dalam memerangi korupsi. Setiap institusi penegak hukum harus melakukan terobosan besar untuk membangun mekanisme kelembagaan yang berintegritas dan bebas dari konflik kepentingan, sehingga dapat menutup segala celah dari potensi terjadinya korupsi, dan secara transparan mengungkapkan kepada publik.

TERIMA KASIH



Jl. Cisadane No. 8, Menteng – Jakarta Pusat

Telp: (021) 31927996/98, Fax: (021) 3143867

Website: www.indikator.co.id